

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Misi Gereja

A.1. Pengertian Misi

Bagaimana memahami misi dalam pergulatan masa kini? Bagaimana mendefinisikan misi kontemporer? Maka dalam keraguan untuk menentukan batas-batas misi di antara banyaknya pengertian dari para ahli, sehingga bab ini akan lebih fokus menjelaskan misi sebagai upaya-upaya warga gereja dalam mencintai dan memperjuangkan kehidupan bersama Allah yang memanggil dan melengkapi umatNya,¹¹ secara khusus dalam birokrasi pemerintahan.

Berbicara tentang misi gereja, umumnya, orang mengacu pada Matius 28:18-20 sebagai dasar gerakan misi gereja, dianggap sebagai amanat atau perintah agung. Namun, sayangnya, jarang orang mempertimbangkan makna lain dari frasa *poieuthentes oun* dalam teks Yunani, yang dapat diartikan sebagai 'sementara pergi', bukan hanya sebagai kalimat perintah (non-imperatif). Dengan menggunakan pendekatan tafsir naratif terhadap Matius, kita dapat memahami bahwa pasal ini tidak berdiri sendiri, melainkan berdampingan dengan amanah-amanah lain yang tak

¹¹ C S Rappan Paledung, Nindyo Sasongko, and Indah Sriulina, *Misiologi Kontemporer : Merentangkan Horison Panggilan Kristen*, Pertama (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2019), xi.

kalah luhur, seperti Matius 25:31-46 yang menyoroti identifikasi Tuhan Yesus dengan orang kecil, terpinggirkan, dan hina. Begitu juga dengan Matius 22:37-40, di mana Yesus menegaskan pentingnya kasih terhadap Allah dan sesama manusia, serta Matius 7:12 yang membawa prinsip Kaidah Kencana (Golden Rule) dari Tuhan Yesus.¹²

Dalam bukunya "Transformasi Misi Kristen," David J. Bosch memberikan penjelasan mendalam mengenai misi dengan mengatakan bahwa misi diartikan sebagai pengutusan Tuhan; itu berarti misi adalah inisiatif Tuhan sendiri untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Nya. Misi adalah rencana Allah sendiri atau pengutusan Allah (*missio Dei*) yang kekal untuk menghadirkan syalom bagi umat manusia dan seluruh ciptaan-Nya. Dari pengertian ini, menjadi jelas bahwa misi adalah rencana Allah atau inisiatif yang berasal dari pihak Allah sendiri untuk mengungkapkan isi hati-Nya dan mewujudkan syalom kepada manusia dan segenap ciptaan-Nya.¹³

Selama lima puluh tahun terakhir (setengah abad), terjadi pergeseran yang halus namun signifikan dalam pemahaman terhadap misi, yang kini lebih diakui sebagai misi Tuhan. Pada abad-abad sebelumnya, konsep misi diartikan dalam berbagai perspektif. Terkadang, penekanan

¹² Emanuel Gerrit Singgih, *Dari Ruang Privat Ke Ruang Publik: Sebuah Kumpulan Tulisan Teologi Kontekstual Emanuel Gerrit Singgih*, ed. August Corneles Tamawiwiy, Pertama (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 16.

¹³ David J Bosch, *Transformasi Misi Kristen: Sejarah Teologi Misi Yang Mengubah Dan Berubah*, trans. Stephen Suleeman, Cetakan 6 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 15.

ditempatkan pada dimensi soteriologis, melihat misi sebagai penyelamatan individu dari kutukan abadi.

Secara tradisional, konsep misi diartikan sebagai upaya pewartaan Injil keselamatan dan ajakan kepada orang-orang untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai Juruselamat serta mengikuti teladan-Nya dalam kehidupan mereka.¹⁴ Atau, interpretasi dapat bersifat kultural, melibatkan pengenalan orang-orang dari Timur dan Selatan terhadap berkat dan keistimewaan Kristen Barat. Misinya pun sering dipahami dalam konteks gerejawi, sebagai perluasan gereja atau denominasi tertentu. Ada juga definisi misi yang bersifat historis, menganggapnya sebagai proses yang akan mengubah dunia, baik melalui evolusi atau peristiwa luar biasa, menjadi kerajaan Allah.¹⁵

Dokumen Dewan Gereja-gereja se-Dunia *"Together towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscape"* menegaskan bahwa misi bermula dari esensi Allah Tritunggal, di mana cinta-kasih sebagai wujud dari pengikut Trinitas Kudus mengalir kepada seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan. Trinitas diidentifikasi sebagai Allah yang mencipta, menebus, dan memelihara seluruh kehidupan. Dalam konteks ini, misi

¹⁴ Paledung, Sasongko, and Sriulina, *Misiologi Kontemporer : Merentangkan Horison Panggilan Kristen*, xii.

¹⁵ Paledung, Sasongko, and Sriulina, xi.

diartikan sebagai undangan universal bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam visi dan karya Allah.¹⁶

Dalam semua contoh ini, dan dengan berbagai pendekatan yang seringkali bertentangan, hubungan intrinsik antara kristologi, soteriologi, dan doktrin Trinitas—yang begitu krusial bagi gereja awal—berangsur-angsur tergantikan oleh salah satu dari beberapa interpretasi doktrin kasih karunia.¹⁷

Namun, setelah Perang Dunia Pertama, para misiolog mulai memberikan perhatian lebih pada kemajuan dalam teologi biblika dan sistematika. Dalam pertemuan para Misionaris Brandenburg tahun 1932, Karl Barth (1932-1957) dengan tegas menyatakan bahwa misi sebenarnya adalah aktivitas Tuhan sendiri. Dalam makalah "*Die Mission als theologisches Problem*" (1933), Karl Hartenstein juga menyatakan keyakinan yang sama. Beberapa tahun setelahnya, pada konferensi *International Missionary Council (IMC)* di Tambaram pada tahun 1938, pernyataan dari delegasi Jerman menjadi katalis penting dalam perkembangan pemahaman baru tentang misi. Delegasi tersebut mengakui bahwa jika bukan Tuhan yang berinisiatif yang diwujudkan melalui "tindakan kreatif Tuhan, maka Kerajaan-Nya tidak akan terwujud dalam pembentukan akhir Langit Baru dan Bumi Baru," dan mereka

¹⁶ Paledung, Sasongko, and Sriulina, xi.

¹⁷ Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*, American Society of Missiology Series, 471.

menyatakan keyakinan bahwa hanya sikap eskatologis seperti ini yang dapat menghindarkan gereja dari sifat sekuler.¹⁸

Secara keseluruhan, pengaruh Barthian (pengaruh dari Karl Barth) sangat signifikan. Barth dapat dianggap sebagai eksponen pertama dari sudut pandang teologi baru yang secara nyata berlawanan dengan pendekatan yang digunakan teologi pencerahan pada zaman itu. Dampak dari pemikiran itu terhadap para misionaris mencapai puncaknya pada Konferensi Willingen IMC (1952). Di sini, gagasan *missio Dei* pertama kali muncul dengan jelas, meskipun istilah tersebut belum digunakan secara tepat. Misi dalam konteks ini diyakini sebagai inisiatif Tuhan sendiri dan ditempatkan dalam konteks doktrin Tritunggal, bukan dalam konteks eklesiologi atau soteriologi.

Umumnya *missio Dei* dipahami sebagai tindakan Allah Bapa mengutus Anak, dan Allah Bapa dan Anak mengutus Roh, digabungkan dengan mencakup "gerakan" lain: Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengutus gereja ke dunia. Dalam pemikiran misionaris, hubungan ini dengan doktrin Tritunggal dianggap sebagai inovasi penting. Citra misi Willingen menggambarkan misi sebagai keterlibatan dalam karya Tuhan, di mana misi tidak memiliki eksistensi sendiri, melainkan hanya dalam tangan Tuhan yang mengutus, sehingga misi dapat disebut sebagai misi sesungguhnya. Selain itu, misioner inisiatif diakui berasal dari Tuhan.

¹⁸ Bosch, 472.

Meskipun pertemuan Willingen memiliki tema "Kewajiban Misionaris Gereja", pidato-pidato yang disampaikan dalam pertemuan tersebut diterbitkan dengan judul "*Missions Under the Cross*" (1953). Oleh karena itu, selain penekanan bahwa misi adalah milik Tuhan, penekanan pada salib juga mencegah kemungkinan kepuasan pribadi misionaris. Dalam upaya menyempurnakan pemahaman tentang *missio Dei*, maka kalimat yang paling tepat adalah misi pada dasarnya bukanlah aktivitas gereja, melainkan merupakan sifat yang melekat pada Allah. Tuhan adalah Tuhan yang misioner.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa misi adalah bagian dari hakikat alami Allah. Misi tidak hanya menjadi tugas atau kewajiban, melainkan merupakan inti dari hati, sifat, dan perbuatan Allah, yang sering disebut sebagai *missio Dei*. Pada abad ke-20, pemahaman ini semakin diterima oleh orang-orang Kristen, menyadari bahwa dasar tugas misi seharusnya berasal dari pemahaman Allah. *Missio Dei*, misi Allah, menjadi fondasi bagi gereja dalam melaksanakan pekabaran Injil. Allah menciptakan dunia dengan tujuan agar dunia ini memuliakan-Nya, dan dunia menjadi panggung untuk menampilkan kemuliaan Allah. Di dunia ini, peran gereja adalah memuliakan Allah, menjadi berkat bagi dunia, dan mewujudkan Kerajaan Allah. Oleh karena itu, misi gereja (*missio ecclesiae*) bagi dunia tidak terlepas dari alasan dibalik tindakan misi

¹⁹ Bosch, 472.

Allah (*missio Dei*) yang bekerja di dunia melalui misi Kristus (*missio Christi*).²⁰

Allah adalah sumber kehidupan dan kehendak-Nya adalah agar semua yang dimiliki-Nya dapat hidup dalam persekutuan dengan-Nya. Melalui Yesus Kristus, kita melihat wujud kasih, pemeliharaan, dan penebusan Allah terhadap kehidupan, serta bimbingan-Nya menuju kelimpahan (Yoh. 10:10). Oleh karena itu, Allah berdiri sebagai lawan terhadap segala yang merugikan atau merusak kehidupan.²¹

Dalam *Together towards Life* penekanan diberikan pada kehidupan di dalam Roh Kudus sebagai hakikat dari misi, sebagai inti dari apa sebab kita melakukan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita menjalani kehidupan. Misi dianggap sebagai detak jantung Allah, dan kita diundang untuk menyesuaikan irama jantung kita dengan jantung-Nya. Hidup dalam Roh sebagai misi berarti memiliki keterbukaan radikal dan kontinu sebagai bentuk ketaatan kita terhadap karya Roh (bnd. Yoh. 3:8). Oleh karena itu, misi dalam Roh kehidupan dapat diartikan sebagai kesiapan kita untuk dikejutkan oleh cara Allah bekerja yang selalu tidak terduga.²²

²⁰ Bagus Surjantoro, *Hati Misi: Kesaksian Misionaris Indonesia Menjelajah 5 Benua, Pertama* (Yogyakarta: Percetakan Andi, 2006), 34.

²¹ Paledung, Sasongko, and Sriulina, *Misiologi Kontemporer : Merentangkan Horison Panggilan Kristen*, xi.

²² Paledung, Sasongko, and Sriulina, xi–xii.

Dalam konteks seperti yang telah diuraikan di atas, *missio Dei* menurut Olaf Herbert Schumann hendak menegaskan bahwa pengutusan tetap ada di tangan Allah. Itu berarti gereja adalah “teman sekerja Allah” dan telah menjadi anggota-anggota jemaat, serta sebagai bagian dari tubuh Yesus Kristus. Jadi tubuהל (gereja) yang menghidupi tatanan *Logos Incarnatus*, tetapi tidak memiliki kuasa untuk mengaturnya sesuai dengan kehendak yang menghidupinya. Lebih lanjut Schuman menganggap sebagai kekeliruan besar apabila gereja memiliki keinginan untuk mengambil alih misi sebagai bagian dari program atau kegiatan yang dikendalikan sesuai dengan keinginannya. Gereja hendaknya menjadi gereja misioner yang termanifestasi dalam semangat hidup yang dijiwai Injil Kristus, sehingga dapat memberikan keteladanan dalam menjalani hidup. Misi harus menjadi hakikat gereja atau nafas gereja, bukanlah kegiatan yang sifatnya opsional (boleh atau tidak dilakukan). Dewasa ini gereja hendak menjadikan dirinya sebagai lembaga propaganda untuk menyebarkan ajaran Kristen yang dibungkus dengan kemasan keagamaan, tetapi tidak dijiwai dengan semangat Roh Allah yang mengubah manusia dan membangun rumah Allah di dalam hati (diri) manusia, bukan di pinggir jalan raya. Semangat ini dilihat bukan sebagai misi Kristen melainkan dianggap sebagai propaganda keagamaan.²³

²³ Olaf Herbert Schumann, *Agama-Agama Berhadapan Dengan Masyarakat: Pendekatan Pada*

Misi gereja perlu melakukan harmonisasi praksis untuk menciptakan paradigma baru arah bergereja. Gereja akan kembali pada praksis pengutusan sesuai yang "Kuperintahkan". Perintah itu diantaranya terdapat dalam Matius 7:12 tentang yang berisi perintah tentang melakukan kepada orang lain apa yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita dan Matius 22:37-40 yang berisi tentang kasih, dan sekaligus sebagai penegasan bahwa perintah dalam kedua nats ini adalah memuat tentang keseluruhan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan demikian misi gereja akan didasarkan atas belas kasih Yesus, bukan sebatas pemberian "tanda" bahwa seseorang milik Yesus, tetapi memberi penekanan pada upaya memanusiaikan manusia.

A.2. Inti Misi: Pengutusan dan Diutus

Kata "misi" biasanya lebih sering dikaitkan dengan pekerjaan misionaris lintas budaya yang dilakukan oleh gereja-gereja yang kita kenal. Ini mencakup perkumpulan-perkumpulan misionaris, upaya penginjilan dan pendirian jemaat baru, misionaris yang menjalani karir jangka panjang atau misi jangka pendek, serta jaringan global dari lembaga-lembaga dan individu-individu.

Semua gambaran ini memiliki kesamaan dalam hal mengutus dan diutus. Pengertian tersebut, tentu saja, berasal dari akar kata Latin dari kata misi itu sendiri, dan sangat tepat. Dan juga sangat alkitabiah. Tidak

diragukan lagi bahwa Alkitab menunjukkan bahwa Allah mengutus banyak orang "dengan misi dari Allah", dan gerakan misionaris dalam kitab Kisah Para Rasul dimulai dengan sebuah gereja yang merespons dorongan ilahi tersebut dengan mengutus Paulus dan Barnabas untuk melakukan perjalanan misionaris mereka yang pertama. Namun, dengan menyadari bahwa misi pada intinya adalah mengutus dan diutus, maka akan menimbulkan pertanyaan lain: diutus untuk melakukan apa? Alkitab mengatakan bahwa Allah memang mengutus banyak orang.

Namun, cakupan dari hal-hal yang menjadi tujuan pengutusan orang-orang tersebut sangatlah luas. Kata "mengutus" digunakan dalam semua kisah berikut ini. Yusuf diutus (tanpa disadari pada awalnya) untuk berada dalam posisi untuk menyelamatkan nyawa di masa kelaparan (Kej. 45:7). Musa diutus (tanpa disadari pada awalnya) untuk membebaskan manusia dari penindasan dan eksploitasi (Kel. 3:10). Elia diutus untuk mempengaruhi arah politik internasional (1 Raja-raja 19:15-18). Yeremia diutus untuk memberitakan Firman Tuhan (misalnya, Yeremia 1:7). Yesus menyatakan perkataan Yesaya bahwa Ia diutus untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kebebasan, untuk memberikan penglihatan bagi orang buta, dan untuk menawarkan pembebasan dari penindasan (Luk. 4:16-19; bdk. Yes. 61:1).

Dalam konteks Alkitab, konsep mengutus dan diutus memang menjadi inti dari misi. Alkitab mencatat berbagai macam kegiatan yang

diberkati oleh Allah yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang diutus-Nya, mulai dari memberikan bantuan kepada yang kelaparan, bertindak untuk keadilan, memberitakan, mengajar, menyembuhkan, hingga melakukan administrasi. Namun, seringkali, ketika kita menggunakan kata "misi" dan "misionaris", kita cenderung mengaitkannya dengan aktivitas penginjilan.

Dalam teologi alkitabiah, misi tidak hanya terbatas pada penginjilan, tetapi juga mencakup segala bentuk pelayanan dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah untuk membawa kebaikan dan berkat kepada umat-Nya serta untuk memperluas Kerajaan-Nya di dunia ini. Ini mencakup memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, memperjuangkan keadilan sosial, mengajar Firman Allah, menyembuhkan yang sakit, serta mengelola administrasi gereja dengan baik.²⁴

A.2.1. Misi dalam PL: Para Nabi, Israel, dan Bangsa-bangsa

Biasanya, ketika para ahli tafsir Kitab Suci mencari "pesan misi", terutama dalam Perjanjian Lama, mereka mengidentifikasi pesan tersebut ketika ada pembicaraan tentang "bangsa-bangsa". Setiap kali kedaulatan *Yahweh* disebutkan sebagai sesuatu yang melampaui hanya perhatian terhadap bangsa Israel, itu secara tidak

²⁴ Christopher J. H. Wright, *The Mission of God's People: A Biblical Theology of the Church's Mission* (Michigan: Zondervan, 2010), 15–16.

langsung mengacu pada bangsa-bangsa lainnya. Kisah penciptaan, kejatuhan, dan penyelamatan yang disampaikan dalam Kejadian 1-11 menempatkan sejarah seluruh dunia dalam kerangka yang diatur oleh satu penguasa, yang juga adalah Tuhan yang memelihara dan mengikat perjanjian dengan Israel.²⁵

Lebih tegasnya lagi, panggilan Abraham berkaitan dengan maksud penyelamatan Allah bagi semua bangsa. Beberapa penafsir menginterpretasikan ini sebagai tanda bahwa Abraham adalah seorang misionaris karena dia meninggalkan tempat asalnya dan pergi mengikuti janji yang samar namun berkaitan dengan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Contohnya, Max Warren menyatakan bahwa, "Gereja Rasuli muncul ketika Allah memanggil Abraham keluar dari Ur-Kasdim dan menyuruhnya pergi ke tanah yang tidak dikenal baginya, dan Abraham taat. Ketika kasih karunia Allah dalam memilih Abraham bertemu dengan iman Abraham dalam menerima panggilan itu, maka gereja lahir. Dengan demikian, makna pemilihan - dipilih untuk keluar - tidak hanya menjadi hak istimewa yang mementingkan diri sendiri, tetapi juga sebuah tugas untuk menjadi perantara atau wakil antara Allah yang memilih dan bangsa-bangsa.²⁶

²⁵ John Howard Yoder and Gayle Gerber Koontz, *Theology Of Mission : A Believers Church Perspective* (Illinois: InterVarsity Press, 2014), 58.

²⁶ Yoder and Koontz, 59.

Dimensi misionaris yang tersirat dalam iman Perjanjian Lama adalah keberadaan atau kelemahan dewa-dewa lain atau berhala. Setiap kali polemik terhadap penyembahan berhala ini diajukan, secara inheren ada pesan yang ditujukan kepada para penyembah dewa-dewa tersebut, meskipun konteks literatur anti-penyembahan berhala ini biasanya terfokus pada disiplin internal bangsa Israel. Pada tingkat yang lebih luas, visi kenabian tentang bangsa-bangsa yang datang ke Yerusalem untuk mempelajari Taurat memiliki dampak misionaris. Salah satu teks yang paling terkenal adalah Mikha 4:1-4, yang sejalan dengan Yesaya 2:1-4, tetapi juga terdapat dalam Mazmur 46, Yehezkiel 28:25-26, dan Zakharia 8:20-23. Dalam pandangan ini, Yerusalem dianggap sebagai pusat dunia, sebuah pernyataan tentang dunia dan Yerusalem itu sendiri (Yeremia 3:17, 16:19). Bangsa-bangsa di seluruh dunia akan datang ke Yerusalem untuk memberikan persembahan (Yesaya 18:7), mengenal *Yahweh*, mengakui pemilihan Israel, mempelajari Taurat (Mazmur 67), dan mengalami pemulihan peradaban. Istilah yang digunakan untuk peradaban semacam itu adalah perdamaian, yang dijelaskan dalam konteks ekonomi: "Mereka akan mengubah pedang mereka menjadi cangkul dan tombak mereka menjadi alat-alat pemotong; bangsa tidak akan mengangkat pedang melawan bangsa, dan mereka tidak akan belajar lagi berperang. Mereka akan

duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara mereka, dan tidak ada yang akan membuat mereka takut, karena mulut TUHAN semesta alam telah berbicara." (Mikha 4:3-4).²⁷

Akan tetapi, orang-orang Yahudi meyakini bahwa bangsa-bangsa lain akan mencapai kemajuan spiritual yang lebih besar jika mereka tidak hanya mendengarkan hukum Taurat dan mencari kedamaian, tetapi juga jika mereka mulai menghindari daging babi, menghormati hari Sabat, melakukan persembahan kurban, dan mentaati hukum Taurat secara keseluruhan. Beberapa ayat secara langsung menggambarkan harapan bahwa *Yahweh* akan dikenal dan dipuji oleh bangsa-bangsa lain. Salah satunya adalah Mazmur 67: "Biarkanlah bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah; biarkanlah segala bangsa memuji Engkau. Biarkanlah bangsa-bangsa bersorak-sorai dan bersukacita, karena Engkau menghakimi bangsa-bangsa dengan adil dan memimpin bangsa-bangsa di bumi" (Mazmur 67:3-4).²⁸

Nyanyian Hamba yang Menderita, yang terdapat dalam Kitab Yesaya, juga memiliki implikasi misionaris. Seperti yang terlihat dalam Yesaya 42:1-4, kita mendapati bahwa roh *Yahweh* telah dituangkan di atas Hamba dan bahwa ia akan "membawa

²⁷ Yoder and Koontz, 59.

²⁸ Yoder and Koontz, 60.

keadilan kepada bangsa-bangsa" (Yesaya 42:1). Harold Rowley, seorang ahli Perjanjian Lama dari gereja Baptis, menyoroti implikasi misionaris ini yang logis mengikuti dogma monoteisme: jika hanya ada satu Allah, maka Allah tersebut haruslah Allah bagi semua orang, dan pemilihan kelompok manusia tertentu untuk mengenal satu Allah yang benar secara otomatis memanggil mereka untuk menjadi pewarta-pewarta Allah. Rowley juga merujuk kepada Yesaya 42:2-3 - "Ia tidak akan berseru-seru atau meninggikan suaranya, tidak akan membuat terdengar suaranya di jalanan. Buluh yang patah tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang tergelapkan tidak akan dipadamkannya; Ia akan menegakkan keadilan dengan tekun. Dalam Yesaya 49, kita melihat bahwa tugas Hamba bukan hanya "untuk membangkitkan suku-suku Yakub dan memulihkan orang-orang Israel yang masih hidup" (Yesaya 49:6), tetapi juga untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Yesaya 50:4-9 menambahkan elemen penderitaan dalam pelayanan kepada bangsa-bangsa lain, sementara Yesaya 52:13-53:12 menegaskan pembenaran penderitaan Hamba yang menderita itu, ketika terungkap bahwa penderitanya adalah sebagai pembayaran tebusan bagi "banyak orang". Daripada menyimpulkan bahwa ayat-ayat ini hanya berlaku untuk nabi itu sendiri, orang lain pada masanya, tokoh masa depan, atau suatu komunitas, semua elemen

ini mungkin terdapat di dalamnya. Hamba tersebut mungkin mewakili Israel dalam berbagai aspek maknanya: sisa yang setia di dalam Israel, individu yang tergabung dalam sisa yang setia itu, atau figur yang akan muncul di masa depan. Dalam semua kasus, jika itulah tujuan yang telah Allah nyatakan, maka kesaksian Israel kepada *Yahweh* haruslah menjadi kesaksian sebagai seorang hamba bagi bangsa-bangsa lain.²⁹

Oleh karena itu, sah-sah saja untuk menyatakan bahwa upaya para misionaris asing berakar pada seluruh Alkitab dan bukan hanya pada Perjanjian Baru. Namun, yang lebih penting bagi orientasi kita adalah memahami bagaimana pandangan Perjanjian Lama ini berbeda dengan cara kita memahami misi di zaman modern. Israel belum secara aktif mengambil langkah untuk melakukan misi di bangsa-bangsa lain. Namun, mereka cukup menunjukkan keterbukaan untuk mengintegrasikan orang-orang dari suku lain ke dalam komunitasnya. Hukum Musa mengatur hak-hak orang asing, dan cerita seperti Yosua dan Hakim mendukung gagasan bahwa banyak orang berada di tanah Kanaan ketika orang Israel mungkin bergabung dengan aliansi keluarga mereka. Lebih jauh lagi, identitas Israel tidak terbatas pada keturunan langsung Abraham; Populasi Israel beragam, dengan

²⁹ Yoder and Koontz, 60–61.

sebagian besar orang mungkin adalah keturunan Abraham, tetapi juga termasuk bangsa lain. Meskipun ia mungkin berfokus pada kisah Abraham, Israel mengakui kehadiran orang lain dalam kisahnya. Bahkan dalam perjalanan keluar Mesir, ketika diasumsikan hanya orang-orang keturunan Yahudi sejati yang datang, terdapat referensi tentang sejumlah orang yang ternyata bukan keturunan Yahudi namun tetap bergabung dengan kelompok tersebut.³⁰

Ada dua istilah yang berbeda yang mengacu pada orang-orang ini. Pada awal eksodus dari Mesir, Keluaran 12:38 menyebut mereka sebagai "kerumunan orang yang bercampur baur". Apa yang dimaksud dengan "kerumunan orang yang bercampur baur"? Istilah Ibrani untuk ini - *ēreb* - hanya muncul dua kali dalam Perjanjian Lama. Namun, di tempat lain, kata ini muncul dalam Nehemia 13:3, di mana kata tersebut jelas-jelas merujuk kepada orang-orang yang berasal dari berbagai suku bangsa, seperti orang-orang Samaria. Dengan membandingkan teks dari berbagai kitab atau periode sastra Ibrani, tampaknya istilah ini, dengan makna yang melampaui identitas etnis, telah ada di sana.

Ada juga istilah lain yang menyiratkan hal yang sama namun kurang jelas. Istilah ini tidak akan memiliki banyak makna

³⁰ Yoder and Koontz, 61–62.

jika tidak ada referensi ke "orang banyak yang bercampur". "Rakyat jelata di antara mereka sangat ingin makan, dan orang Israel pun menangis lagi, katanya: 'Seandainya kami mempunyai daging untuk dimakan! Kami teringat akan ikan yang dahulu kami makan dengan cuma-cuma di Mesir, akan ketimun, melon, daun bawang, bawang merah dan bawang putih, tetapi sekarang tenaga kami sudah kering dan tidak ada lagi yang dapat kami lihat selain manna ini'" (Bilangan 11:4-6). Konsep ketidakpuasan dengan makanan datang dari "rakyat jelata". Siapakah rakyat jelata ini? Mereka mungkin beberapa orang Israel, atau mungkin bukan. Teksnya tidak cukup jelas.³¹

Begitu bangsa Israel menetap di Palestina, populasi utamanya terdiri dari banyak orang yang bukan keturunan langsung Abraham, tetapi telah bergabung dalam perjanjian sepanjang perjalanan mereka. Meskipun mungkin bukan fokus utama dalam identitas Israel, inklusi ini merupakan bagian dari perjalanan hidup mereka. Umat Allah terus bertambah dengan penambahan anggota baru. Umat Allah terbuka untuk menjadi anggota.³²

³¹ Yoder and Koontz, 62.

³² Yoder and Koontz, 63.

Tetapi hal itu bukanlah sebuah kesaksian misionaris kepada bangsa-bangsa. Juga bukan kesaksian kepada bangsa-bangsa ketika di dalam Yesaya beberapa nubuat ditujukan kepada Koresy atau ketika di dalam Amos kata-kata kutukan ditujukan kepada semua bangsa-bangsa tetangga. Bentuk sastra dari sebuah alamat kepada bangsa atau penguasa lain tersebut tidak berarti bahwa sang nabi pernah membawa pesan tersebut ke sana, dan dampak dari pesan tersebut jelas ditujukan kepada pendengar Ibrani. Yunus membawa pesan kepada Niniwe, tetapi itu bukanlah proklamasi hukum Allah. Ketika orang-orang Niniwe bertobat, tidak ada indikasi bahwa mereka mulai membawa korban ke Yerusalem atau berhenti makan daging babi. Johannes Blauw menekankan hal ini ketika ia mengatakan bahwa sikap terhadap bangsa-bangsa lain dalam Perjanjian Lama adalah "sentripetal"; bahwa meskipun visi bangsa Israel bersifat universal karena menegaskan bahwa hanya ada satu Allah bagi seluruh dunia, namun keuniversalannya tidak bersifat misioner.³³

Meskipun kita mengamati gambaran yang paling dramatis dan sering disebut tentang bangsa-bangsa yang datang ke Yerusalem, yang meyakinkan mereka bahwa pemulihan Israel adalah tindakan Allah, para bangsa tersebut tidak diundang karena

³³ Yoder and Koontz, 63.

ada para misionaris yang mengirim pesan Yahudi kepada mereka atau pesan yang lebih universal tentang kedaulatan Allah. Peran Israel dalam memenuhi janji bahwa bangsa-bangsa lain akan datang hanyalah dengan menunggu dan mematuhi hukum Taurat meskipun dalam penderitaan. Mencerminkan pandangan umum, Harold Rowley seperti yang dikutip oleh John Howard Roder menguraikan bahwa upaya untuk mengkonversi bangsa-bangsa lain ke dalam praktik keagamaan Israel tidaklah menjadi fokus utama dalam Perjanjian Lama: "Mereka bukanlah para misionaris yang berusaha mengajak bangsa-bangsa untuk beriman kepada *Yahweh*, melainkan mereka yang begitu berterima kasih atas berkat Allah, sehingga mereka hanya bisa membagikan kebaikan-Nya kepada semua orang. Tetapi ini adalah hasil dari rasa terhutang mereka kepada Allah, bukan karena kepedulian kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan ketika penglihatan tentang bangsa-bangsa datang sangat jelas seperti dalam Yesaya 2 dan Mikha 4, apa yang dipelajari oleh mereka yang datang adalah hukum Allah bagi bangsa-bangsa lain, bukan iman Israel. Mereka tidak mengadopsi kultus, pengorbanan di Bait Allah, sunat, atau bahkan ibadah sabbat; yang mereka lakukan adalah kembali ke tanah air mereka untuk hidup dalam damai.³⁴

³⁴ Yoder and Koontz, 63–64.

Deskripsi Perjanjian Lama tidak menunjukkan gagasan bahwa bangsa-bangsa lain otomatis menjadi bidah/sesat, namun justru mereka kurang mengenal *Yahweh*. Faktanya, ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa orang selain Israel bisa mengenal Tuhan yang benar. Dalam kisah-kisah Perjanjian Lama, kita melihat orang-orang kudus di luar bangsa Israel diakui memiliki hubungan yang sah dengan Allah yang benar. Mereka bukan hanya orang-orang benar sebelum Abraham, tetapi bahkan setelah Abraham: seperti Melkisedek, Ayub, dan Ratu Syeba. Melkisedek menarik karena Abraham memberinya persepuluhan (Kejadian 14:17-24), sedangkan Yitro memberikan nasihat kepada Musa tentang cara mengatur penduduk Sinai (Keluaran 18). Orang-orang luar yang saleh ini rupanya memiliki moralitas yang valid. Dalam Maleakhi 1:11 terlihat bahwa mereka menyembah Allah yang benar: "Sebab dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, nama-Ku masyhur di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dipersembahkan kepada nama-Ku dupa dan persembahan yang tidak haram, sebab nama-Ku masyhur di antara bangsa-bangsa, demikianlah firman TUHAN semesta alam. Tetapi *kamu* menjajiskannya" (Mal. 1:11-12, cetak miring ditambahkan). Namun, Israel tidaklah secara eksklusif

memiliki hak untuk mempraktikkan ibadah kurban sesuai perintah ilahi.³⁵

Gagasan/konsep bahwa siapapun selain bangsa Israel dapat mengenal Tuhan yang benar menunjukkan sesuatu yang khas tentang sifat iman historis, berbeda dengan agama metafisik. Jika keberadaan Tuhan adalah masalah teori metafisika, maka kredibilitas atau kemampuan untuk mengetahui keberadaan ini seharusnya sama bagi semua orang, dan pembatasan informasi hanya untuk sekelompok tertentu yang memiliki hak istimewa akan dianggap tidak adil dan kebetulan semata. Jika penyelamatan bergantung pada informasi metafisik atau jika penyelamatan itu sendiri merupakan keadaan metafisik yang tidak ada hubungannya dengan cerita tertentu, maka kita harus memikirkan hilangnya semua orang yang tidak mengetahuinya karena cadangan informasi spesifik ini. Bagi komunitas keagamaan historis, persepsi terhadap orang asing sangatlah berbeda.³⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perjanjian Lama tidak merenungkan tentang kesesatan kekal dari orang-orang yang tidak pernah mendengar tentang Yahweh, juga tidak merenungkan tentang takdir orang-orang sebelum Abraham

³⁵ Yoder and Koontz, 64–65.

³⁶ Yoder and Koontz, 65.

A.2.2. Tema-tema Perjanjian Lama yang Lebih Luas

Sejauh ini telah menelusuri dorongan misi dalam teks Perjanjian Lama dan mencatat adanya batasan dan kerendahan hati dalam apa yang disampaikan dan tidak disampaikan mengenai misi dibandingkan dengan beberapa penafsiran kontemporer tentang misi. Meskipun begitu, ada beberapa aspek teologis umum dalam Perjanjian Lama yang mungkin memiliki kepentingan yang lebih besar bagi misi daripada yang telah kita eksplorasi, yang mengulangi ide-ide yang telah kita bahas sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apa makna keseluruhan pesan Perjanjian Lama dalam konteks pentingnya misi?³⁷

Adapun aspek teologis umum dalam Perjanjian Lama yang dimaksud, adalah **Pertama, tidak ada ilah-ilah lain**. Salah satu tema yang ada di mana-mana, yang terlihat terutama pada paruh terakhir dari periode Perjanjian Lama, adalah pergumulan antara Allah yang benar melawan allah-allah palsu. Dikatakan bahwa allah-allah itu tidak ada. Mereka bukanlah allah-allah yang benar; mereka adalah kesia-siaan dan kekosongan. Tetapi kita masih harus berjuang melawan mereka. Pesan kenabian bukanlah hal yang sama dengan pesan pencerahan budaya modern, di mana kita mengatakan kepada orang-orang, "Dewa-dewa itu tidak benar-benar ada, jadi

³⁷ Yoder and Koontz, 65–66.

Anda tidak perlu memikirkannya." Sebaliknya, ada perjuangan melawan kekuatan penyembahan berhala, dan perjuangannya adalah sesuatu yang berbeda dari mendidik orang tentang fakta bahwa dewa-dewa ini tidak ada. Lebih dari itu, karena mereka telah mencengkram manusia. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada dapat mencengkram manusia?³⁸

Di era modern, kita cenderung mengadu agama dengan mereka yang tidak beragama, teisme melawan ateisme, dan mereka yang menganut suatu agama melawan mereka yang tidak beragama. Kita sering mengasosiasikan pekerjaan misionaris dengan upaya permintaan maaf atau upaya untuk meyakinkan orang akan perlunya dimensi keagamaan atau transenden, atau praktik agama. Namun, dalam Perjanjian Lama, upaya untuk meyakinkan manusia akan keberadaan Tuhan yang transenden bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah apakah mereka dapat membedakan antara Tuhan yang nyata dan Tuhan yang palsu. Penekanan utamanya adalah pada identitas Tuhan yang terungkap dalam kisah Abraham, Ishak dan Yakub, atau Penguasa alam semesta. Bagi orang Israel, identitas Tuhan tercermin dalam aspek moral, sosial, politik, keluarga, dan profesional. Ini melibatkan praktik keagamaan, namun lebih jauh lagi, seperti dalam prosedur ritual

³⁸ Yoder and Koontz, 66.

tertentu seperti pengorbanan di kuil. Perbedaan yang signifikan adalah bangsa Israel menyembah Tuhan yang nama dan ciri-cirinya berbeda dengan dewa-dewa palsu, dan oleh karena itu bangsa tersebut harus hidup sesuai dengan perjanjian khusus yang mereka miliki dengan Allah.³⁹

Kedua mengenai penciptaan dan perjanjian. Pengamatan tambahan dari kesaksian Perjanjian Lama berkaitan dengan hubungan antara tiga konsep: penciptaan, providensia, dan pemilihan. Teks-teks tersebut mengonfirmasi bahwa Allah adalah Pencipta alam semesta. Kemudian, kita menyaksikan perjalanan sejarah, di mana Allah diakui sebagai pemelihara dan penguasa atas segala peristiwa. Akhirnya, konsep pemilihan muncul. Dari cara cerita disusun, urutannya terjadi seperti ini.⁴⁰

Pengalaman Israel menggambarkan sebuah urutan yang berbeda. Dimulai dengan peristiwa perjanjian, kita kemudian melihat Allah yang terlibat dalam perjalanan sejarah. Dari sini, penting untuk menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta; alam semesta ini tidak muncul secara spontan. Dalam evolusi literatur Perjanjian Lama, kita melihat pergeseran dari pengalaman perjanjian konkret menuju penekanan yang lebih

³⁹ Yoder and Koontz, 66–67.

⁴⁰ Yoder and Koontz, 67.

abstrak tentang providensia atas sejarah dan penciptaan. Kisah ini dimulai dengan penciptaan, namun bukan sebagai konsep yang berdiri sendiri. Ini adalah pengakuan dari generasi yang mengalami perjanjian pertama, yang kemudian mencatat sejarah dunia melalui lensa perjanjian itu.⁴¹

Aspek teologi umum yang ketiga yang dimaksud, yaitu: kedaulatan Allah. Pengamatan umum lainnya tentang teologi Perjanjian Lama adalah visi tentang kedaulatan ilahi yang tidak hanya terus berlanjut sejak Kejadian 1-11, tetapi juga mencakup seluruh dunia.⁴²

Kedaulatan ilahi diekspresikan melalui bangsa-bangsa lain dan juga melalui Israel. Pemerintahan Allah atas sejarah dalam beberapa hal berpihak kepada Israel, atas nama Israel. Kadang-kadang hal ini dilakukan untuk menggunakan Israel untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Tetapi Allah memakai Asyur (Yes. 10), Koresh (Yes. 45), Nebukadnezar (Yer. 42:11-12), atau kaisar-kaisar lain untuk tujuan-tujuan Allah sendiri.⁴³

Tugas utama Israel adalah menjalankan peran sebagai Israel, mempertahankan identitas perjanjian mereka. Poin ini tetap relevan dalam konteks saat ini untuk memandu tindakan kita. Mungkin

⁴¹ Yoder and Koontz, 67.

⁴² Yoder and Koontz, 67.

⁴³ Yoder and Koontz, 67-68.

tugas utama gereja dalam misi adalah menjalankan perannya sebagai gereja. Iman Abraham, ketika dia bersedia untuk bermigrasi, dan kesetiaan para pengikutnya untuk menjadi umat yang setia, menunjukkan prioritas pada identitas yang diikuti oleh kemungkinan tindakan yang akan diambil oleh Allah. Apa pun yang dilakukan kemudian, baik secara kebetulan atau melalui visi yang lebih jelas, langkah pertama yang harus diambil adalah kesetiaan. Ini bukan karena kesombongan, tetapi karena kesadaran akan panggilan yang mendasari dari Tuhan.⁴⁴

Bilangan 22-24 menceritakan usaha Raja Balak untuk menyewa seorang nabi untuk mengutuk bangsa Israel. Ini adalah bagian dari pesan dari nabi Bileam: "Bagaimana mungkin saya mengutuk orang yang tidak dikutuk oleh Allah? Bagaimana saya bisa mencela orang yang tidak dicela oleh TUHAN? Sebab dari puncak gunung, saya melihatnya; dari bukit-bukit, saya melihatnya. Inilah sebuah bangsa yang tinggal sendiri, yang tidak dianggap oleh bangsa-bangsa lain." (Bilangan 23:8-9). Kesendiriannya dalam kenabian, kesediaannya untuk menjadi unik, adalah persyaratan pertama bagi Israel.

Israel harus hidup sesuai dengan perjanjian. Tidak boleh ada penyembahan berhala. Perjanjian Lama mencerminkan kritik terus-

⁴⁴ Yoder and Koontz, 68.

menerus terhadap sikap yang ada dalam kehidupan berbangsa, raja, dan negara yang melupakan jalan Tuhan. Selama pengasingan, teks-teks ini menunjukkan bahwa masih ada harapan pada janji-janji perjanjian, meskipun mereka telah kehilangan negara dan kewarganegaraannya. Ada keyakinan dalam diri Hamba - bahwa pelayanannya akan bebas dari kekerasan dan bahwa ketaatannya akan menjadi instrumen pilihan. Muncul pemahaman tentang kemanusiaan yang bisa menjadi dasar terjadinya sesuatu yang baru dalam Perjanjian Baru.⁴⁵

A.2.3. Tinjauan Umum: Misi Perjanjian Baru

Ketika membicarakan misi dan Perjanjian Baru, keduanya memiliki hubungan yang erat. Perjanjian Baru tidak dapat dipisahkan dari praktik misi. Ini menunjukkan bahwa misi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Sehingga, orang percaya terlibat dalam misi, karena kekristenan sejati tak lepas dari misi. Perjanjian Baru meneruskan misi Allah sebagaimana di Perjanjian Lama, di mana Israel dipanggil ke Kanaan. Tujuan Allah untuk Israel adalah lebih dari sekadar menempati Kanaan, tetapi menjadi teladan dalam iman kepadanya. Ini mencakup pemberitaan iman kepada bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah.

⁴⁵ Yoder and Koontz, 68–69.

Adapun misi dalam Perjanjian Baru memiliki sifat sentrifugal. Artinya, pesan keselamatan disampaikan dari gereja ke seluruh suku bangsa. Amanat Agung, yang tertulis dalam Matius 28:18–20, adalah contoh terkenal dari sifat ini.

Misi dalam Perjanjian Baru (PB) merupakan kelanjutan misi Allah dalam Perjanjian Lama. Jika demikian halnya, itu berarti Perjanjian Baru tidak hanya dokumen misi Injil, tetapi penjelmaan misi Injil itu sendiri. Dengan kata lain, Perjanjian Baru adalah suara suci yang mengajak semua orang ke dalam Kerajaan Allah. Ini bukanlah sekadar aturan atau sistem gereja, melainkan panggilan ilahi yang menggema dari padang gurun hingga surga, mengundang setiap telinga yang mendengarnya untuk datang.⁴⁶ Oleh karena itu, sebagai ekspresi kekristenan yang hidup, misi adalah inti dari apa yang ditawarkan Perjanjian Baru kepada dunia.

Pada bagian selanjutnya, akan diuraikan beberapa pengajaran penting tentang misi dalam Perjanjian Baru, yang diadaptasi dari pemikiran Fransiskus Irwan Widjaja dalam bukunya *Misiologi: Antara Teori, Fakta dan Pengalaman*. Adapun hal yang dimaksud, yaitu:

⁴⁶ Fransiskus Irwan Widjaja, *Misiologi: Antara Teori, Fakta Dan Pengalaman* (Yogyakarta: Percetakan Andi, 2018), 32.

Pertama, Injil Matius menyoroiti Kristus sebagai penguasa dunia. Hal ini mengungkapkan otoritas-Nya yang mutlak, karakter-Nya yang kuat, serta karya dan ajaran-Nya yang penting. Matius secara dramatis memulai Injilnya dengan menyebutkan silsilah Yesus (Mat. 1:1), menghubungkannya dengan garis keturunan Daud (2 Sam. 7:8–16) dan Abraham ((olehmu semua bangsa akan memperoleh berkat” - Kej. 15:18), menegaskan kedudukan-Nya dalam perjanjian Allah dengan manusia.⁴⁷

Matius mengakhiri Injilnya dengan memberikan perintah kepada para murid untuk melakukan pengajaran kepada semua bangsa dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengajarkan mereka untuk mematuhi segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus.⁴⁸

Kedua, Injil Markus mengungkapkan Yesus sebagai Hamba Allah yang Perkasa. Injil Markus menunjukkan Kristus sebagai pekerja ilahi yang merestorasi dunia yang hilang dan jatuh. Dengan mengusir setan-setan, menyembuhkan penyakit, dan mengalahkan kematian, Dia memperbarui yang berdosa dan memulihkan yang hancur. Sebagai pelayan Allah yang penuh kuasa, Dia berjuang tanpa henti untuk menyelamatkan manusia, mengimpartasikan roh-

⁴⁷ *Ibid.*, 32.

⁴⁸ Widjaja, *Misiologi: Antara Teori, Fakta Dan Pengalaman*, 32.

Nya kepada para murid-Nya. Dia mengimpartasikan roh yang sama kepada para murid-Nya, sampai setelah kematian-Nya. Merekapun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya” (Mrk. 16:20). Panggilan Injil Markus adalah untuk menderita bersama Kristus dalam penebusan dunia.⁴⁹

Ketiga, Lukas mengungkapkan Yesus sebagai anak manusia yang sempurna yang memiliki solidaritas kepada kaum miskin dan terbuang. Lukas memulai Injilnya dengan menceritakan kejadian-kejadian ajaib terkait kelahiran Yohanes dan Yesus, termasuk kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria yang dijanjikan akan melahirkan Mesias (Luk. 1:25–38). Seluruh Injil Lukas mengungkapkan pesan bahwa manusia berdosa dapat diselamatkan dan diberkati melalui Yesus, yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang (Luk. 19:10).

Injil ini mengandung janji pemulihan yang hanya ada dalam Yesus, menunjukkan kasih-Nya kepada dunia yang terhilang. Kristus, dengan kemenangan-Nya, menjawab kegagalan dunia, memberikan harapan dan penyelamatan kepada umat manusia (Luk. 24:46–49).⁵⁰

⁴⁹ Widjaja, 33.

⁵⁰ Widjaja, 34.

Keempat, Injil Yohanes menyingkapkan Yesus sebagai Anak Allah. Injil Yohanes ditulis untuk menegaskan ke-Tuhanan Yesus, dengan menguraikan keteraturan progresif kata dan perbuatan yang mengungkapkan-Nya sebagai Anak Allah (Yoh. 20:31). Tujuan utamanya adalah memperkuat iman manusia bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah (Yoh. 1:12–13). Yohanes menggambarkan Kristus sebagai Firman, identitas utama-Nya. Melalui keberadaan, perkataan, dan tindakan-Nya, kita memperoleh pemahaman tentang Allah. Dalam hubungan-Nya dengan murid-murid-Nya, Kristus melanjutkan pelayanan-Nya, mengutus mereka untuk melanjutkan karya penyelamatan-Nya (Yoh. 20:21).⁵¹

Kelima: Surat penggembalaan Paulus: Gereja sebagai Paguyuban Baru. Surat-surat Paulus memperlihatkan misi dalam konteks kemenangan Allah yang akan datang, dan merupakan hasil langsung dari pekerjaan misinya. Untuk memahami misi secara menyeluruh, menurut Widjaja, penting untuk mempelajari surat-surat Paulus secara komprehensif, seperti:⁵²

- a. Surat Roma: merupakan karya strategis Paulus karena merasa gereja di Roma memiliki posisi yang penting. Manifesto "Kabar Baik"-nya diuraikan dengan tema

⁵¹ Widjaja, 35.

⁵² Widjaja, 35–38.

"Kebenaran asali Tuhan" (Rm. 1:16–17), menekankan bahwa kebenaran dapat dicapai melalui Kristus (Rm. 3:21–28) dan terbuka bagi semua orang (Rm. 3:29–30). Paulus menggambarkan dunia dalam keadaan hancur (Rm. 3:9–23) akibat dosa (Rm. 5:12), namun anugerah pembenaran melalui Kristus menjadi harapan bagi semua (Rm. 5:18) Surat ini memberikan Kabar Baik yang menyelamatkan bagi dunia.

- b. Surat 1 dan 2 Korintus: ditulis untuk menangani penyalahgunaan yang mengancam kehidupan rohani gereja di Korintus, menampilkan tantangan nyata yang dihadapi orang Kristen dalam budaya yang tidak ramah. Paulus sebagai misionaris memberikan prinsip-prinsip kepercayaan kepada Kristus untuk membangun gereja baru di tengah paganisme.
- c. Surat Galatia: bertujuan memperbaiki ajaran-ajaran salah yang menyesatkan para petobat baru, menegaskan pentingnya Injil anugerah Tuhan tanpa syarat. Tema utamanya adalah membenarkan orang non-Yahudi melalui iman, menjadi dokumen penting dalam misi. Kunci pemikirannya adalah "membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman" (Gal. 3:8).

- d. Surat Efesus: ditulis untuk menegaskan kedudukan ilahi gereja dan menunjukkan cara anggota gereja seharusnya bertindak. Surat ini menggambarkan kehormatan orang percaya melalui anugerah, serta pentingnya gereja sebagai tubuh Kristus dan perjalanan berharga sebagai orang Kristen. Dalam gereja, perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi tidak ada; semua sama di hadapan Kristus (Ef. 2:11–22).
- e. Surat Filipi: ditulis untuk mengucapkan terima kasih kepada gereja Filipi atas dukungan finansial yang mereka kirimkan kepada Paulus (Flp. 4:15 – 19). Hanya gereja Filipi yang secara khusus disebutkan memberikan bantuan keuangan, yang merupakan dukungan yang sangat penting bagi Paulus dan menjadi contoh yang patut diikuti oleh gereja lain dalam misinya (Flp. 1:3–7).
- f. Surat Kolose: ditulis untuk melindungi gereja dari pengaruh guru-guru palsu yang ingin memperkenalkan ajaran-ajaran sesat (Kol. 2:4–8). Paulus menekankan bahwa Kristus adalah satu-satunya Penyelamat dan menegaskan pentingnya mempertahankan iman yang benar (Kol. 2:9–13). Melalui surat ini, Paulus memberikan bimbingan kepada gereja-gereja di sepanjang sejarah dalam menghadapi tantangan

ajaran sesat yang muncul dalam misi mereka (Kol. 2:18–23; 4:15–16).

- g. Surat 1 dan 2 Tesalonika ditulis untuk memberikan panduan dalam doktrin-doktrin misi dan untuk memberikan dukungan kepada gereja awal di tengah tantangan penganiayaan. (1 Tes. 1:7–10). Surat kedua juga ditujukan untuk mengoreksi pemahaman yang salah tentang kedatangan kedua Kristus dan mendorong orang-orang Kristen di Tesalonika untuk tetap teguh dalam iman mereka (2 Tes. 2:1–5).
- h. Surat 1 dan 2 Timotius serta Titus ditujukan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan kerja Paulus. Melalui surat-surat ini, Paulus memberikan nasihat kepada para pengkhotbah muda tentang tata kelola gereja, pengakuan iman, dan disiplin. Pertumbuhan gereja seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang aturan, iman, dan disiplin, yang juga relevan dalam konteks misi. Dengan surat-surat ini, Paulus menyediakan panduan yang penting bagi gereja-gereja sepanjang sejarah.
- i. Surat Filemon, yang merupakan surat terpendek dari semua surat Paulus, mengandung inti misi yang kuat dengan menekankan kebenaran dan perubahan dalam konteks

sosial. Surat ini mencerminkan revolusi terhadap norma-norma lama, menunjukkan bahwa tidak hanya orang non-Yahudi atau luar, tetapi bahkan budak pun dapat diterima di dalam Kerajaan Allah sebagai saudara dalam Kristus (Flp. 1:10, 14–16). Bagi Paulus, semua tulisannya adalah bagian dari usaha misi untuk memperkenalkan Kristus kepada semua bangsa. Pemikiran dan pekerjaannya selalu didorong oleh kasih kepada Kristus dan keprihatinan akan keselamatan dunia yang terhilang.

Keenam, surat-surat misi lainnya. Beberapa surat misi lainnya antara lain surat: Ibrani, Yakobus, Petrus, dan Yohanes.

- a. Surat Ibrani: berperan sebagai jembatan (*connecting link*) antara masa lalu dan masa depan agama Yahudi. Ia menyoroti bahwa ritual-ritual besar dalam Taurat hanyalah simbol, dengan kebenaran sejati terungkap melalui Kristus (Ibr. 9:1–11). Konsep tentang kuil, imam, altar, dan tabir bukanlah hanya kisah lokal, melainkan memiliki makna universal yang terwujud dalam Kristus (Ibr. 9:11–15). Segala yang dijaga oleh bangsa Yahudi kini telah tersedia bagi seluruh dunia, mengakhiri masa ketidaktahuan dan membuka masa kebenaran yang sesungguhnya.

- b. Surat Yakobus: mengusung semangat misioner dalam penyampaian pesannya. Ia menyajikan ajaran-ajaran praktis dari Yesus tentang iman, perbuatan baik, dan doa. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan misi, surat ini mencerminkan kesaksian akan penyebaran ajaran Kristus pada masa apostolik, khususnya kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen dan tersebar di berbagai belahan dunia (Yak. 1:1). Yakobus sendiri, seorang Yahudi ortodoks, memberikan kesaksian yang kuat melalui suratnya kepada komunitas Yahudi Kristen di luar negeri, menjadikannya sebuah karya yang menginspirasi.
- c. Surat Petrus: memberikan bukti yang kuat akan rekonsiliasi antara pandangan sempit dan pandangan luas pada masa apostolik, terutama antara Petrus dan Paulus. Meskipun pernah terjadi pertentangan langsung antara keduanya, surat ini menunjukkan bahwa Petrus telah sepenuhnya merangkul pandangan misioner Paulus (Gal. 2:11). Tujuan surat ini tampaknya adalah memberikan kesaksian terhadap kemajuan misi gereja-gereja apostolik dan rekonsiliasi antara tokoh-tokoh penting dalam gereja awal.
- d. Surat Yohanes: menampilkan signifikansi yang dalam dalam konteks misi. Dengan fokus yang maju dalam pemikiran,

surat ini menyoroti bahwa kebenaran kekristenan tidak terbatas pada konteks Yudaisme, tetapi relevan untuk seluruh dunia. Yohanes menekankan bahwa kekristenan bukanlah eksklusif untuk bangsa Yahudi, melainkan untuk seluruh umat manusia. Dia mengajukan gagasan bahwa kebenaran yang dibawa oleh Kristus dapat diterima oleh siapapun tanpa batasan. Yohanes melihat dunia dalam kegelapan, dan kedatangan Kristus adalah pencerahan dari Allah untuk membawa terang kepada dunia (1 Yoh. 1:5-7).

Ketujuh, Kitab Wahyu. Kitab Wahyu merupakan penutup yang kuat bagi Perjanjian Baru dengan menyampaikan kembali dan mengkonfirmasi pesan misioner Injil. Tokoh-tokoh yang muncul dalam empat Injil muncul kembali dalam Kitab Wahyu, sebagai cahaya dalam kegelapan, dengan gambaran yang memukau, seperti merpati yang menawan di tengah badai petang (Why. 1:12-18). Di dalamnya, Anak Manusia menyatakan dirinya sebagai "Alpha dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terakhir," memberikan pesan kepada gereja-Nya sebagai domba yang dikorbankan tetapi kini hidup selama-lamanya, dimahkotai dalam kemenangan. Seluruh suara dari seluruh dunia bersaksi bahwa Dia adalah "Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuhan" (Why. 19:1-16).

A.3. Tanggapan terhadap Gerakan Misionaris Modern: Menuju

Paradigma Baru

Selama abad ke-20, semakin jelas bahwa paradigma misi yang telah membentuk pemahaman dan praktik gereja selama lebih dari satu abad tidak memadai. Ada berbagai respons teologis terhadap apa yang dianggap sebagai kekurangan dalam pemikiran dan praktik misi gereja yang ada. Ini bukan berarti bahwa gereja saat ini telah mempraktikkan semua hal tersebut - jauh dari itu! Sebaliknya, respon yang dibahas pada bagian ini, walau sangat ringkas, dan hanya beberapa hal saja, adalah merupakan respon teologis atau missiologis, respon dari para pemikir misi terhadap praktik misi selama dua abad terakhir. Ini merupakan adaptasi dari beberapa pemikiran dari Michael W. Goheen, yaitu:

A.3.1. Missio Dei sebagai respons terhadap misi antroposentris.

Munculnya semangat Pencerahan pada abad kedelapan belas memberi landasan bagi keyakinan tentang kemajuan di negara-negara barat pada saat itu. Tak heran jika pada abad kesembilan belas, ideologi eskatologi pasca milenium yang meracik gerakan misionaris juga dipengaruhi oleh keyakinan akan kemajuan ini. Dasar ideologi kemajuan adalah humanis, menempatkan keyakinan yang kuat pada potensi manusia untuk membentuk arah sejarah dengan perencanaan, strategi, dan usaha yang terarah, serta manfaat

dari peradaban barat, semuanya berperan sentral dalam misi pada abad ke-19 dan ke-20.⁵³

Respons teologis terhadap pandangan manusia yang sangat dihargai ini adalah langkah penting menuju pemahaman misi dalam kerangka *missio Dei*: misi pada dasarnya adalah pekerjaan Tuhan. Misi gereja, dalam perspektif ini, adalah untuk berbagi dalam karya yang sedang dilakukan oleh Allah, yang menunjukkan peran krusial dari kerjasama manusia dengan upaya Allah dalam memajukan misi-Nya di dunia ini.⁵⁴

A.3.2. Misi Pembebasan sebagai Respons terhadap Pembangunan

Kerangka kerja kolonial masih berpengaruh dalam banyak aspek gerakan misionaris saat ini. Ketika negara-negara yang dulunya terjajah secara bertahap meraih kemerdekaan politik dari negara-negara barat, menjadi jelas bagi banyak orang bahwa bentuk baru dari kolonialisme ekonomi masih mempertahankan keterikatan negara-negara selatan kepada barat. Narasi pencerahan yang terus berkembang tentang kemajuan, dengan semua konsekuensi pembangunan yang diikuti, terungkap sebagai bentuk imperialisme itu sendiri. Sebagian besar intervensi sosial gereja di luar negeri kurang kritis terhadap gagasan pembangunan dan kecenderungan

⁵³ Michael W. Goheen, *Introducing Christian Mission Today: Scripture, History and Issues* (Illinois: Inter Varsity Press Academic, 2016), 156–57.

⁵⁴ Goheen, 157.

untuk meminjam dari narasi budaya humanistik tentang kemajuan. Isu yang muncul bukanlah kurangnya perkembangan dan kebutuhan akan pembangunan; yang terpenting adalah dominasi dan ketergantungan yang dibuat oleh struktur ekonomi global yang tidak merata. Yang diperlukan adalah pembebasan yang mengakui bahwa "ketergantungan dan ketidakadilan struktural menjadi akar dari masalah" yang memiskinkan bangsa-bangsa non barat.⁵⁵

Inilah salah satu faktor yang memunculkan gerakan-gerakan pembebasan yang telah berkembang sejak pertengahan abad ini. Pembebasan telah membentuk berbagai teologi kontekstual di Amerika Latin, Afrika dan Asia dan telah menyerukan sebuah cara baru dalam melakukan teologi misi dan mempraktikkan misi. Bagaimanapun cara menilai gerakan ini? Goheen berpendapat, bahwa gerakan ini telah dan terus memainkan peran penting dalam misi modern.⁵⁶

A.4. Hubungan Gereja dan Negara

Pada bagian ini, akan diuraikan dinamika kehadiran gereja di dalam dunia yang nyata dalam berhadapan dengan negara sebagai tatanan politik masyarakat. Dalam point ini, akan diuraikan pemetaan relasi gereja dan negara. Maka dalam tulisan ini, identifikasi relasi gereja dan

⁵⁵ Goheen, 157.

⁵⁶ Goheen, 157.

negara ini meminjam taksonomi dari Zakaria J. Ngelow dalam memudahkan kita memahami bagaimana relasi gereja dan negara. Dalam taksonomi Ngelow ada empat model, yaitu:

1. Supremasi negara terhadap gereja (gagasan gereja-negara) atau sebaliknya.
2. Supremasi gereja terhadap negara (gagasan negara-gereja).
3. Paralelisme dalam bentuk pemisahan total
4. Paralelisme dalam bentuk kemitraan.

Ngelow menjelaskan bahwa ketika sebuah masyarakat Kristen dipaksa oleh negara, identifikasi dengan Injil dapat menyebabkan distorsi, baik dengan Injil direduksi menjadi struktur sosial (hubungan 1), maupun ketika kebijakan politik dijustifikasi dengan klaim keagamaan (hubungan 2). Pada masa Kekaisaran Romawi Timur (Byzantium), supremasi negara atas gereja menghasilkan situasi di mana gereja mendapat perlindungan negara namun kehilangan kemampuannya untuk menegakkan kebenaran Injil terhadap penguasa. Meskipun negara tidak ikut campur dalam ajaran gereja, namun memiliki otoritas dalam urusan kelembagaan gereja. Pola ini masih berlanjut dalam gereja

Ortodoks, gereja-gereja Lutheran, dan gereja-gereja Calvinis, termasuk di Indonesia pada masa kolonial.⁵⁷

Sebaliknya, pola hubungan (hubungan 1) di mana gereja berada di atas negara, dikembangkan oleh Gereja Roma Katolik pada Abad Pertengahan, didasarkan pada pemahaman tentang dua tingkat realitas: yang kodrati dan yang adikodrati. Yang kodrati tunduk kepada yang adikodrati dan diperlengkapi olehnya. Negara beroperasi di ranah kodrati, sementara gereja di ranah adikodrati. Superioritas gereja diperkuat dengan doktrin dua pedang, yang memberikan kekuasaan gereja atas urusan rohani dan dunia. Oleh karena itu, kepala gereja (Sri Paus) dianggap sebagai raja di antara raja; negara-negara dianggap tunduk pada Gereja Roma Katolik. Pola ini juga terlihat dalam praktik Protestan pada masa Reformasi, seperti teokrasi Calvin di Jenewa, yang bertujuan untuk memperbaiki gereja. Meskipun pola ini mungkin memberi keuntungan duniawi bagi gereja, namun juga melanggar hak asasi kebebasan beragama dalam masyarakat, dan bahkan menyamakan pemerintahan Kristen dengan Kerajaan Allah.⁵⁸

Kemudian, seiring dengan perkembangan pandangan sekuler tentang negara dan semakin melemahnya kekuasaan gereja, hubungan

⁵⁷ Mulkhan et al., "Agama Dan Negara : Perspektif Islam, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu, Protestan," 139–40.

⁵⁸ Mulkhan et al., 140.

antara gereja dan negara dihapuskan (hubungan 3). Negara dan agama (gereja) memiliki dasar, tujuan, dan pola kehidupan yang berbeda. Pemisahan total ini, baik dalam pandangan sekuler liberal maupun dalam pandangan aliran-aliran Kristen radikal, mengabaikan panggilan sosial Kristen di mana makna Injil atau tanda-tanda Kerajaan Allah seharusnya diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, baik melalui kehidupan pribadi maupun melalui lembaga gereja.⁵⁹

Hubungan kemitraan yang sehat antara gereja dan negara (hubungan 4) dikembangkan oleh para Reformator berdasarkan pengalaman jemaat-jemaat awal. Menurut pandangan Calvin, ia menekankan tentang kedudukan berdampingan dan kerjasama meskipun praktiknya berbeda, bahwa dalam kemitraan ini diakui adanya fungsi bersama negara dan gereja terhadap manusia dan masyarakat, serta upaya untuk berkolaborasi secara dinamis dalam berbagai bentuk, dengan memperhatikan bidang masing-masing. Fungsi ini terkait dengan pemahaman bahwa manusia dan masyarakatnya cenderung terpengaruh oleh kuasa dosa yang termanifestasi dalam ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, konflik, dan sebagainya. Namun, kemitraan dengan negara selalu dipandang secara kritis-prophetis, karena di satu sisi negara

⁵⁹ Mulkhan et al., 140.

dianggap sebagai Hamba Allah (Roma 13), namun di sisi lain bisa saja melakukan kesalahan dan jatuh ke dalam dosa.

A.5. Sikap Gereja dalam Pembangunan Bangsa

Menurut T. B. Simatupang, Gereja sudah ada di dunia dan dikirim oleh Tuhan ke dunia. Tuhan tidak mengirimkannya ke tempat lain karena Dia sendiri adalah Tuhan bagi dunia. Dunia tidak hanya alam semesta dan Bumi. Dalam pengertian yang lebih luas, dunia mencakup bumi, alam semesta, kesejahteraan umat manusia, dan upaya mereka untuk mengisi dan menaklukkan bumi. Menurut T. B. Simatupang, pengertian ini menunjukkan bahwa umat manusia dengan kebudayaannya, kehidupan politik, sosial, ekonomi, sejarah, ideologi agama, teknologi, dan harapan dan kekhawatiran mereka adalah bagian penting dari dunia.⁶⁰

Lebih lanjut T. B. Simatupang mengatakan bahwa Dalam konteks pembangunan, gereja dihadapkan pada masalah mendasar tentang hubungan antara gereja dan perkembangan masyarakat, negara, dan kebudayaan tempat gereja berada. Pembangunan adalah proses yang dilakukan oleh manusia dalam sejarah untuk meningkatkan masyarakat, negara, dan kebudayaan dengan menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan kontemporer. Di satu sisi, gereja adalah bagian dari

⁶⁰ T. B. Simatupang, *Iman Kristen Dan Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985), 97.

kebudayaan, masyarakat, dan negara yang sedang berkembang. Namun, gereja bukan hanya bagian dari entitas-entitas tersebut. Menurut metafora bahwa gereja adalah tubuh Kristus, gereja memiliki hubungan khusus dengan Kristus. "Tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus," kata Alkitab dalam 1 Korintus 3:11. Gereja telah berkontribusi pada pembangunan melalui pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian sejak kedatangannya di Indonesia. Akibatnya, gereja-gereja di Indonesia terus berpartisipasi dan membantu pembangunan nasional berdasarkan tugas pengikutnya berdasarkan Injil Yesus Kristus.⁶¹

Dengan bertindak sebagai hamba dan pelayan sesuai teladan Yesus, gereja di Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dengan cara yang positif, inovatif, kritis, dan realistis. Mereka yang memiliki sikap positif memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menerima hal-hal yang baik; mereka yang memiliki sikap kreatif menunjukkan bahwa Roh Kudus telah memainkan peran dalam upaya gereja untuk membangun; mereka yang memiliki sikap kritis menunjukkan bahwa setiap upaya pembangunan yang dilakukan oleh gereja harus sesuai dengan firman Tuhan; dan mereka yang memiliki sikap realistis menyadari bahwa ada batas waktu dan batas kenyataan yang dimiliki oleh proses pembangunan gereja.

⁶¹ Simatupang, 98-99.

Tugas panggilan gereja dalam pembangunan bangsa ini tidak hanya mencakup memberikan ruang bagi gereja untuk berpartisipasi dan melayani dalam pembangunan bangsa, tetapi juga mengajak dan mengharapkan semua warga negara dan golongan untuk berpartisipasi secara sadar. Semua orang harus berpartisipasi dengan hak dan kewajiban yang sama dalam upaya pembangunan negara.

Gereja berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini dengan dua tujuan. Pertama, mereka ingin melaksanakan pembangunan bangsa ini sebagai pengamalan Pancasila dengan harapan dapat menciptakan kesejahteraan, keadilan, kebebasan, persaudaraan, perdamaian, dan kemanusiaan yang diinginkan Tuhan untuk dunia ini. Kedua, mereka ingin berkontribusi pada pembaharuan, pembangunan, dan persatuan gereja, serta mempromosikan kemanusiaan dalam bidang teologi. Dengan demikian, T. B. Simatupang berpendapat bahwa seluruh partisipasi gereja dan umat Kristen dalam pembangunan bangsa harus didasarkan pada upaya untuk menegakkan tanda-tanda penyelamatan dan mencegah kedatangan kerajaan Tuhan.⁶²

B. Birokrasi

B.1. Pengertian Birokrasi

⁶² Simatupang, 105.

Secara harfiah, filsuf Perancis Baron de Grimm dan Vincent de Gournay adalah orang pertama yang menggunakan istilah birokrasi. "bureau" diambil dari bahasa Yunani "kratos", yang artinya "pemerintahan", di mana pejabat berkolaborasi dengannya. Pemerintahan sebelumnya di Eropa, termasuk Perancis, dikenal memiliki kinerja yang buruk dan melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap warganya. Istilah "bureaumania" digunakan untuk menyindir kinerja buruk pejabat. Istilah ini kemudian berkembang menjadi kata-kata seperti "bureaucratie" (dalam bahasa Perancis), "burocratie" (dalam bahasa Jerman), dan burocrazia (dalam bahasa Italia), dan *bureaucracy* (bahasa Inggris).⁶³ Istilah-istilah inilah yang digunakan untuk mengacu pada institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam suatu negara.

Secara etimologi, istilah "birokrasi" merupakan gabungan kata "bureau" (bahasa Perancis) yang merujuk pada "meja tulis" dan "kratos" (bahasa Yunani) yang artinya "pemerintahan". Dengan demikian, dari sini, menjadi jelas bahwa birokrasi awalnya mengacu pada mereka yang melakukan pekerjaan di belakang meja tulis di berbagai kantor. Selanjutnya pengertian ini mengalami perkembangan. Dari sudut pandang politik, birokrasi dianggap sebagai representasi aparat

⁶³ Muhammad, *Birokrasi: Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance*, ed. Bobby Rahman, Rudi Kurniawan, and Hadi Iskandar (Aceh: Unimal Pres, 2018), 5.

pemerintahan suatu negara yang bertanggung jawab melakukan ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku melalui tahapan tertentu atau unit-unit administratif sesuai dengan tugas yang diterima masing-masing individu. Mereka berperan untuk memutuskan tahap-tahap kebijakan yang sesuai dengan konteks sehubungan dengan persoalan yang sedang dihadapi.⁶⁴

Menurut Rina Martini, kata birokrasi dapat diartikan sebagai organisasi yang rasional, dan merupakan salah satu ciri masyarakat modern yang mutlak.⁶⁵ Lebih lanjut, Martini menjelaskan bahwa birokrasi juga dapat bermakna positif, negatif maupun netral, yaitu:

Birokrasi positif adalah birokrasi legal-rasional yang efektif dan efisien yang dibutuhkan oleh negara dan rakyat untuk mengimplementasikan kebijakan negara. Birokrasi negatif memiliki korupsi, patologi, boros, dan ketidakefisienan, serta ketidakefektifan. Birokrasi hanya menguntungkan orang kaya karena itu adalah alat penghisapan kaum miskin dan penghisapan kaum lemah. Namun, birokrasi netral dapat didefinisikan sebagai semua pejabat negara di tingkat eksekutif atau setiap perusahaan besar.⁶⁶

Oleh karena itu, dapat dikemukakan birokrasi merupakan sebuah entitas organisasi yang di dalamnya terdapat aparat pemerintahan dengan tugas melakukan kebijakan-kebijakan yang telah diambil dalam

⁶⁴ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 1.

⁶⁵ Rina Martini, *Birokrasi Dan Politik* (Semarang: Lestari Mediakreatif, 2012), 8-9.

⁶⁶ Martini, 11-12.

menjalankan fungsi dan tugas dari setiap satuan kerja dalam lingkup pemerintahan eksekutif.

Perbincangan mengenai birokrasi merupakan fakta yang terjadi sejak abad ke-19 dan merupakan fakta krusial dalam cerita perjalanan hidup manusia. Jika seseorang ditanya mengenai organisasi paling penting dalam menjalani kehidupan, diprediksi selalu akan menuju kepada birokrasi.

Birokrasi merupakan lembaga yang menjalankan fungsi dan tanggung jawab negara. Ini adalah ruang mesin negara,⁶⁷ di mana terdapat individu-individu (pejabat) yang diberi upah dan bekerja atas perintah negara untuk memberikan saran dan menjalankan kebijakan politik negara. Meskipun secara teoritis, birokrasi diartikan sebagai aparat negara, namun secara praktis, definisi birokrasi ini sering menimbulkan perdebatan.⁶⁸

Di zaman modern seperti saat ini, birokrasi menduduki tempat yang sulit dan merupakan lembaga paling esensial dalam hidup bermasyarakat. Bisa dikatakan bahwa keberlangsungan hidup masyarakat modern hampir tidak mungkin tanpa campur tangan peran birokrasi. Meskipun begitu, ironisnya, birokrasi menyimpan paradoks. Meskipun menjadi lembaga yang sangat dibutuhkan, tetapi sekaligus

⁶⁷ Rod Hague, Martin Harrop, and John McCormick, *Comparative Government And Politics: An Introduction, 11Th Edition*, Eleventh (London: Red Globe Press, 2019), 342.

⁶⁸ Budi Setiyono, *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi*, Ketiga (Bandung: Penerbit Nuansa, 2016), 15.

menjadi lembaga yang paling tidak disukai oleh mayoritas masyarakat. Dengan realitas ini, kita dapat memahami mengapa hanya sebagian kecil dari masyarakat di negara-negara maju yang bersedia menjadi pegawai negeri: selain gaji yang kecil, juga terutama karena citra buruk yang melekat pada birokrasi.⁶⁹

Sejalan dengan pemikiran di atas, Rod Hague, Martin Harrop and John McCormick, dalam bukunya *Comparative Government and Politics* berpendapat bahwa sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik, birokrasi memiliki peran krusial dalam struktur pemerintahan. Birokrat merupakan satu-satunya pegawai pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam pengurusan perizinan seperti SIM atau paspor, pembayaran pajak, maupun transaksi properti. Meskipun keberadaannya sudah menjadi bagian yang familiar, birokrasi seringkali mendapat pemahaman yang keliru dan seringkali diberikan kritik atas kegagalannya, tetapi juga mendapat pujian atas prestasinya. Birokrasi jarang menjadi fokus studi formal di Barat hingga Max Weber mengalihkan perhatiannya pada birokrasi pada awal abad ke-20.⁷⁰

Menurut Ane Permatasari dalam bukunya *Birokrasi Pemerintahan: Sebuah Pengantar*, mengatakan bahwa birokrasi menjadi suatu entitas

⁶⁹ Muhammad, *Birokrasi: Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance*, 11–12.

⁷⁰ Hague, Harrop, and McCormick, *Comparative Government And Politics: An Introduction*, 11th Edition, 160.

formal yang beroperasi di suatu ruang kerja yang biasa disebut sebagai kantor. Lebih dari sekadar organisasi, birokrasi mencerminkan tipe struktur yang terlibat dalam kegiatan administratif, mengkoordinasikan kerja banyak individu secara sistematis. Mereka yang terlibat dalam proses ini bekerja bersama dengan profesionalisme, dipilih dan diangkat untuk menduduki jabatan tertentu yang memiliki tugas dan fungsi yang telah ditentukan oleh atasan mereka. Seleksi birokrat didasarkan pada kecerdasan dan keterampilan, di mana masing-masing individu dipilih untuk melaksanakan tugas fungsi sesuai dengan visi dan misi organisasi demi mewujudkan tujuan yang telah diprogramkan.⁷¹

B.2. Teori Birokrasi Menurut Max Weber,

Max Weber adalah seorang sosiolog dari Jerman yang mencoba memberi fokus pada birokrasi, sehingga membuatnya dikenal sebagai seorang analis birokrasi. Dalam fokusnya, Weber mencoba mendialogkan antara birokrasi dan administrasi: apakah birokrasi yang menciptakan efisiensi administrasi atau justru sebaliknya, malah menimbulkan inefisiensi. Hasil dialog membawa Weber berpendapat bahwa birokrasi merupakan perwujudan organisasi yang merasionalkan kegiatan kolektif demi pencapaian tingkatan tertinggi yang disebut efisiensi. Selain itu, Weber juga mencoba mengeksplorasi konsep atau yang disebutnya

⁷¹ Ane Permatasari, *Birokrasi Pemerintahan: Sebuah Pengantar*, Edisi Pert (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), 2-3.

sebagai tipe ideal dari suatu birokrasi. Menurutnya beberapa hal yang harus dimiliki birokrasi untuk dapat dikatakan sebagai birokrasi yang memiliki tipe ideal, yaitu:

- a. Ada pengelompokan divisi pegawai yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas;
- b. Memiliki Struktur otoritas impersonal;
- c. Ada jenjang yang tersusun secara hirarki;
- d. Ketergantungan pada regulasi formal;
- e. Menerapkan sistem merit bagi pegawai;
- f. Tersedia penjenjangan karir bagi pegawai;
- g. Memisahkan hubungan pribadi dan pekerjaan.

Dalam hal ini Max Weber memiliki sudut pandang positif dan konsep ideal terhadap birokrasi pemerintahan. Birokrasi ini diibaratkan sebagai konsep yang sangat baik, rasional dan berupa sistem organisasi yang melakukan pekerjaan dengan cermat dan tepat.⁷²

Weber berpendapat bahwa jalan yang ditempuh oleh birokratisasi dan alasan-alasan yang mendorongnya sangat berbeda, tetapi birokratisasi lebih disebabkan oleh perluasan intensif dan kualitatif serta penyebaran internal cakupan tugas-tugas pemerintahan daripada peningkatan ekstensif dan kuantitatif. Dalam sistem birokrasi, ada

⁷² Max Weber, *Sosiologi*, trans. Noorkholish and Tim Penerjemah Promothea, Kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 234.

berbagai kemungkinan yang sangat baik untuk menerapkan prinsip spesialisasi dalam fungsi-fungsi administrasi dengan mempertimbangkan secara objektif. Fungsionaris yang telah menerima pelatihan khusus dan yang terus belajar mendapatkan kinerja individual. Melaksanakan tugas dengan cara yang objektif terutama berarti melakukan tugas tanpa mempertimbangkan karakter individu.⁷³

Lebih lanjut Weber melihat birokrasi sebagai sarana untuk merubah tindakan komunikasi menjadi tindakan sosial yang tersusun dengan rapi dan efisien. Di masa lalu, birokrasi digunakan sebagai sebuah alat untuk sosialisasi hubungan kekuasaan, tetapi sekarang menjadi alat penting bagi mereka yang mengontrol aparatur birokratis. Setiap perlawanan massa atau bahkan aksi komunal akan kalah dari aksi sosial yang terarah dan tertata. Selain itu, ketika birokratisasi administrasi diterapkan sepenuhnya, setiap bentuk hubungan kekuasaan akan tetap stabil dan efisien. Sementara seorang birokrat tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari apparatus yang telah diikat oleh posisinya, pihak yang memiliki otoritas tidak memiliki kemampuan untuk menyingkirkan atau mengganti apparatus birokratis otoritas yang telah muncul. Ini disebabkan oleh sistem birokrasi yang bergantung pada pelatihan ahli, spesialisasi fungsional dalam pekerjaan, dan perspektif

⁷³ Weber, 238.

penguasaan berdasarkan kebiasaan dan pelaksanaan tugas tertentu tetapi diintegrasikan secara metodis.⁷⁴

Sistem birokrasi organisasi memiliki efek yang luas berdasarkan struktur sosial dan politik. Dalam sistem birokrasi, distribusi kekuasaan ekonomi dan sosial sangat penting, terutama di daerah di mana mekanisme birokratis yang dominan berkuasa. Oleh karena itu, hasil birokrasi bergantung pada cara kekuasaan diberikan pada alat yang digunakan. Secara teknis, organisasi birokratis adalah alat kekuasaan yang paling kuat di tangan mereka yang memegangnya. Namun, kekuatan yang dapat dipikul organisasi birokratis dalam struktur sosial tertentu berbeda-beda. Posisi kebijakan birokrasi yang sepenuhnya dikembangkan selalu sangat tinggi dalam situasi normal. Majikan politis menemukan dirinya berada dalam posisi penggembira amatir di hadapan ahli dalam manajemen administrasi. Semua birokrasi berusaha meningkatkan apa yang dipelajari secara profesional dengan menyembunyikan pengetahuan dan tujuan. Administrasi birokratis selalu ingin mengatur pertemuan rahasia untuk menghindari kritik. Namun, kepentingan birokrasi yang berkuasa melampaui tempat di mana kerahasiaan dihasilkan oleh kepentingan yang sepenuhnya

⁷⁴ Weber, 258.

fungsional. Tidak ada rahasia jabatan yang dipertahankan; itu adalah penemuan birokrasi.

Mencermati implementasi birokrasi di Indonesia jika diperhadapkan dengan konsep ideal Max Weber, maka akan ditemukan fakta yang berlawanan dengan teori yang dijelaskan. Birokrasi berperan penting dalam proses pembangunan, namun faktanya justru mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan, terutama pada keprihatinan dan adanya rasa tidak puas terhadap tanggung jawabnya menyediakan layanan sebagai aparatur publik demi mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan untuk pembangunan bangsa.

Dengan demikian analisis Weber terhadap birokrasi dapat diringkas dalam poin-poin berikut:⁷⁵

1. Birokrasi melibatkan pembagian tugas yang ditetapkan secara cermat.
2. Wewenang bersifat impersonal dan berada dalam aturan yang mengatur urusan resmi. Keputusan diambil melalui penerapan aturan secara metodis pada kasus-kasus tertentu dan tidak didasarkan pada motif pribadi apa pun.

⁷⁵ Hague, Harrop, and McCormick, *Comparative Government And Polititics: An Introduction*, 11Th Edition, 342-43.

3. Orang-orang direkrut untuk bertugas di birokrasi berdasarkan kompetensi yang terbukti atau setidaknya potensial.
4. Pejabat yang melaksanakan tugasnya dengan kompeten mempunyai pekerjaan dan gaji yang terjamin. Pejabat yang kompeten dapat mengharapkan promosi berdasarkan senioritas atau prestasi.
5. Birokrasi adalah suatu hierarki yang disiplin dimana pejabat tunduk pada wewenang atasannya.

Meskipun Weber telah secara rinci menguraikan tipe birokrasi di atas, pada kenyataannya, tidak semua aspek dapat diterapkan dengan mudah oleh semua jenis sistem pemerintahan dalam konteks tertentu. Sebagai contoh, meskipun syarat kompetensi profesionalitas dan senioritas dalam penunjukan pejabat dalam kedudukan tertentu dapat diterapkan secara konsisten pada beberapa kondisi birokrasi, namun di banyak kondisi birokrasi lain, penerapannya sering kali tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Tidak dirahasiakan bahwa di banyak negara, proses seleksi dan penunjukan birokrasi pejabat tidak selalu didasarkan pada kriteria kualifikasi profesional atau senioritas, tetapi cenderung didasarkan pada kepentingan yang bersifat subjektif. Hal ini umumnya terjadi di negara-negara di mana terdapat intervensi politik dari partai politik tertentu yang tengah memegang kendali di negara tersebut. Mereka cenderung menempatkan para loyalis mereka di

berbagai tingkatan birokrasi untuk memastikan bahwa birokrasi akan beroperasi sesuai dengan kepentingan partai mereka.⁷⁶

Weber menekankan pada sifat rasional dan efisien, yang pada kenyataannya bisa ditelusuri kembali pada konteks sosial-budaya saat ia hidup. Pada zamannya, kebutuhan akan rasionalitas dan efisiensi, tercermin dalam struktur hirarki, dianggap sangat mendesak. Oleh karena itu, konsep rasionalitas dan efisiensi pada masa Weber memiliki perbedaan signifikan dengan kriteria yang diterapkan pada organisasi modern saat ini, mengingat perubahan kondisi zaman yang tidak sebanding dengan era Max Weber.⁷⁷

Menurut David Beetham, Weber memberi pertimbangan pada tiga unsur utama dalam konsep birokasinya. Ketiga unsur tersebut adalah: *pertama*, menganggap birokrasi sebagai organ teknis (technical instrument). *Kedua*, birokrasi dianggap sebagai potensi yang berdiri sendiri dalam komunitas sosial kemasyarakatan, selama birokrasi cenderung untuk melaksanakan fungsi sebagai organ teknis. Ketiga, konsep ini berkembang karena mereka yang bekerja dalam sistem birokrasi tidak dapat memilah sikap mereka dari kepentingan sebagai anggota kelompok masyarakat tertentu. Dalam kondisi ini, birokrasi dapat tergelincir dari peran fungsionalnya karena ada kecenderungan

⁷⁶ Permatasari, *Birokrasi Pemerintahan: Sebuah Pengantar*, 8–9.

⁷⁷ Permatasari, 9.

anggota berasal dari kelompok sosial yang memiliki kepentingan khusus tersebut.⁷⁸

Unsur kedua dan ketiga konsep birokrasi Weberian ini, mencerminkan pemahaman Weber mengenai peran politik pada sistem birokrasi. Unsur politik dapat berpengaruh pada proses kondisi ideal birokrasi. Sistem birokrasi, seperti halnya, telah diakui tak terpisahkan sepenuhnya dari aspek politik. Pendapat ini, yang sering kali diabaikan para penulis dan ahli administrasi publik yang cenderung lebih fokus pada elemen pertama, dapat menyebabkan distorsi dalam teori birokrasi Weberian.⁷⁹

Sebagian ahli menyoroti bahwa fokus birokrasi Weberian terbatas pada cara pengaturan rasional sistem administrasi dan organisasi. Oleh karena itu, persyaratan yang ditegaskan oleh Weber lebih cenderung menitikberatkan pada aspek internal organisasi (*in-world looking*) daripada mempertimbangkan faktor-faktor eksternal (*out-world looking*) yang mungkin memengaruhi sistem birokrasi.⁸⁰

Ciri khas dari birokrasi Weberian adalah bahwa kekuasaan terdapat dalam setiap tingkatan jabatan pejabat. Semakin tinggi jabatan dalam hirarki, semakin besar kekuasaannya, sementara semakin rendah

⁷⁸ Permatasari, 9.

⁷⁹ Permatasari, 9–10.

⁸⁰ Permatasari, 10.

jabatan dalam hirarki, semakin minim kekuasaannya. Tingkatan paling rendah dalam hirarki ini adalah masyarakat, di mana mereka tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Prinsip disiplin dalam model birokrasi Weber menyatakan bahwa tingkatan bawah hirarki tidak boleh atau tidak berani menentang kekuasaan yang ada pada tingkatan atas. Di Indonesia, hirarki kekuasaan ini diselubungi oleh sistem bapakisme atau patrimonial, yang membuat praktik kekuasaan birokrasi ini semakin kuat. Pejabat pada tingkatan bawah tidak berani mengambil tindakan tanpa mendapatkan restu dan petunjuk dari tingkatan atas.⁸¹

Hal inilah yang kemudian membuat konsep birokrasi Weber dikritik oleh Osborne dengan mengatakan bahwa model birokrasi telah berkembang dan memiliki perbedaan mencolok dengan keadaan birokrasi yang dulu diterapkan. Birokrasi yang dikembangkan di masa lalu, organisasinya masih bersifat tradisional, dalam artian ruang lingkupnya baru mencakup pekerjaan rutin dan administratif saja. Kondisi organisasi saat itu, masih memperoleh dukungan dari situasi politik dan ekonomi yang relatif stabil yang berakibat pada lebih efisiennya pekerjaan yang dilakukan. Umumnya masyarakat fokus bekerja di bidang pertanian, sehingga tidak memiliki kecenderungan untuk mengkritisi kualitas kinerja pemerintah. Jauh berbeda dengan

⁸¹ Permatasari, 10.

kondisi saat ini, kritik terhadap kinerja birokrasi sangat tinggi, apalagi diperhadapkan dengan situasi pertumbuhan sosial dan ekonomi yang tidak menentu. Akses terhadap informasi sangat mudah dan cepat, tingkat pendidikan yang semakin naik, mengakibatkan tuntutan terhadap pelayanan di bidang birokrasi semakin tinggi dan kompleks. Kenyataan ini mengharuskan birokrasi menghadirkan pelayanan yang efisien demi terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakatnya.

Lebih lanjut, Rod Hague, dkk menguraikan adapun stereotip tentang birokrasi yang mencakup sifat hierarkis, didorong oleh prosedur, dan terkadang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Meskipun demikian, birokrasi tetap menjadi komponen integral dalam pemerintahan. Untuk memahami dinamikanya, kita perlu memahami struktur birokrasi, tekanan politik dan profesional yang mempengaruhi pekerjaan birokrat, serta bagaimana birokrasi mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.⁸²

Secara tradisional, penelitian mengenai birokrasi lebih fokus pada pejabat pemerintah yang memiliki posisi tetap di berbagai departemen. Pejabat-pejabat elit ini dan departemen-departemen yang mereka pimpin tetap memiliki peran yang sangat signifikan. Istilah "birokrasi" terkadang dibatasi pada konteks ini. Namun, perhatian kini semakin terarah pada

⁸² Hague, Harrop, and McCormick, *Comparative Government And Politics: An Introduction*, 11th Edition, 160.

tata kelola yang lebih luas, melibatkan lembaga-lembaga semi-independen, pemerintah daerah, dan bahkan organisasi non-pemerintah serta perusahaan swasta yang semakin banyak mendapatkan tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program publik.

Dalam konteks ini, istilah "birokrasi" merujuk pada seluruh jaringan publik yang melibatkan berbagai entitas tersebut. Beberapa menggunakan istilah seperti "administrasi publik" atau "manajemen publik" untuk merinci studi tentang sektor publik dalam lingkup yang lebih luas. Tak peduli sebutannya, pemahaman terhadap negara modern dan kedudukan dan perjalanan karier di dalamnya, memerlukan peta mental yang memahami jaringan yang sangat kompleks. Teori struktural memainkan peran yang bermanfaat dalam membantu kita memahami struktur, hubungan, dan interaksi yang mengikat birokrasi dengan bagian lain dari pemerintahan.⁸³

Maka dalam upaya memahami birokrasi, penting untuk mengkaji struktur internal mereka, proses rekrutmen dan tanggung jawab staf, serta metode terbaik untuk mencapai koordinasi antar departemen. Selain itu, perlu dipahami bagaimana memastikan pelayanan yang efisien, terutama dalam situasi di mana tidak ada mekanisme pasar yang beroperasi secara normal. Mencari dan merekrut individu terbaik, serta

⁸³ Hague, Harrop, and McCormick, 161.

memberdayakan karyawan lembaga publik, terutama mereka yang memiliki keterampilan terbatas dan gaji rendah, merupakan tugas yang kompleks. Hal ini melibatkan pengenalan individu dengan misi dan motivasi untuk melayani masyarakat, yang tidak selalu merupakan proses yang mudah.⁸⁴

B.3. Karakteristik Birokrasi

Birokrasi sebagai salah satu sistem pemerintahan yang tersusun secara sistematis, memiliki beberapa karakteristik, yakni: *pertama*, adanya prinsip area yurisdiksional yang diberlakukan secara resmi dan diatur melalui ketentuan dan regulasi yang jelas. Ketentuan administratif yang dimaksudkan memiliki tiga poin penting, yakni 1) aktivitas regular yang dibutuhkan untuk tujuan struktural, diatur secara birokrasi dan didelegasikan melalui strategi tertentu sebagai penugasan resmi; 2) Tugas-tugas resmi tersebut didelegasikan dalam sistem yang bersifat tetapi tetap dibatasi aturan-aturan yang memiliki hubungan dengan alat-alat pemaksaan fisik, keagamaan dan sebagainya; 3) Pemenuhan regular dibentuk dalam perangkat metodis dalam melanjutkan tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan haknya, khususnya bagi mereka yang dipekerjakan (diberi tugas).

⁸⁴ Hague, Harrop, and McCormick, *Comparative Government And Politics: An Introduction*, 11th Edition, 161.

Kedua, ketetapan dalam hirarki jabatan dan adanya tingkatan yang bertingkat memperlihatkan tatanan supraordinasi dan subordinasi yang tersusun dengan rapi yang di dalamnya terdapat pengawasan dari jabatan tinggi terhadap jabatan rendah. Bagi pihak-pihak yang berada dalam sistem tersebut, memberi peluang kepada setiap jabatan untuk memberikan keputusan dengan mekanisme yang teratur dengan jelas.

Ketiga, manajemen jabatan modern mendasarkan sistem birokrasinya pada arsip tertulis dalam bentuk dokumen. Dalam hal ini, sistem birokrasi memerlukan staf pegawai dengan berbagai fungsi untuk berperan aktif dalam jabatan publik, sebagai aparat pelaksana material masing-masing dan berkas-berkasnya, yang kemudian memunculkan sebuah *biro*, yang disebut *kantor* dalam perusahaan swasta.

Keempat, manajemen jabatan. Dalam sistem birokrasi, terdapat manajemen jabatan yang terspesialisasi secara modern melalui serangkaian pelatihan yang sangat profesional.

Kelima, saat jabatan telah berkembang seutuhnya, maka kualitas sumber daya pegawai dan komitmen kerja pegawai sangat dibutuhkan, tentu dengan tidak mengesampingkan fakta bahwa waktu kerjanya dibatasi oleh aturan yang berlaku. Pada keadaan normal, keadaan ini merupakan sebuah produk dari perkembangan panjang, jabatan publik maupun privat.

Keenam, dalam sistem birokrasi, manajemen jabatan yang terbentuk wajib tunduk pada peraturan umum yang berlaku dan menyeluruh pada semua birokrasi dan umumnya mudah dipahami. Memiliki pemahaman yang utuh terhadap peraturan umum yang berlaku tersebut, mengindikasikan bahwa pegawai tersebut telah menguasai pembelajaran tahap pertama dalam sistem birokrasi. Hal ini mencakup yurisprudensi, manajemen administratif atau bisnis.⁸⁵

B.3.1. Birokrasi Pemerintahan

Penduduk adalah kelompok masyarakat yang setuju untuk membentuk pemerintahan. Kesepakatan adalah dasar dari kontrak sosial yang disepakati bersama untuk mengatur kepentingan satu sama lain, dengan demikian masyarakat akan memiliki kehidupan yang layak. Di samping itu, pemerintahan dibentuk untuk berusaha mewujudkan negara yang melindungi dan mewujudkan keadilan sosial secara merata. Menciptakan rasa aman, ketertiban, keadilan, pekerjaan umum, kesejahteraan, dan terpeliharanya sumber daya alam dan keberlangsungan lingkungan hidup merupakan tujuan utama sistem birokrasi pemerintahan dalam konteks ini. Sebagai perwujudan fungsi di

⁸⁵ Abd Halil Hi Ibrahim and Tjahja Supriatna, *Epistemologi Pemerintahan, Pertama* (Yogyakarta: Gramasurya, 2019), 74–75.

atas, pemerintahan suatu negara memerlukan instrumen penerapan, yang dikenal sebagai birokrasi.⁸⁶

Birokrasi adalah alat penting bagi setiap negara, terutama dalam masyarakat modern. Ini sebagai akibat nyata dari tanggung jawab utama pemerintah untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat, pemerintah hendaknya ikut melibatkan diri dalam produksi kebutuhan masyarakat.⁸⁷

Birokrasi merupakan sebuah sistem yang mengorganisasikan negara dengan tugas yang banyak dengan permasalahan yang kompleks, sehingga membutuhkan kontrol yang baik atas operasi pemerintahan. Sungguh menyedihkan bahwa aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh aparat birokrasi sering menghasilkan masalah baru, yang membuat birokrasi tetap diam, tidak peka terhadap perubahan lingkungan, dan bahkan tampaknya tidak terbuka untuk pembaharuan.⁸⁸

Dalam bidang ilmu politik, birokrasi didefinisikan sebagai alat negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi keinginan rakyat untuk kehidupan yang ideal. Oleh karena itu, birokrasi

⁸⁶ Setiyono, *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi*, 34.

⁸⁷ Rika Ramadhanti, "Politik Dan Birokrasi Pemerintahan," *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 96, <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1242>.

⁸⁸ Yudi Rusfiana and Cahya Supriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan*, Alfabeta Bandung, Kesatu (Bandung: Alfabeta, 2021), 1.

tetap ada di masyarakat dan berbeda dengan model sistem pemerintahan yang muncul dari kesepakatan sosial. Dalam sistem pemerintahan, birokrasi ada sebagai akibat dari adanya negara. Jika negara tidak ada, maka secara otomatis birokrasi juga tidak ada. Begitu juga sebaliknya, keberadaan negara juga tak terlepas dari keberadaan birokrasi; atau bisa juga dikatakan, negara mustahil ada jika birokrasi tidak ada. Peran penting birokrasi sangat mendasar karena menjadi faktor penting yang menentukan baik-buruknya tatanan hidup masyarakat suatu negara karena pentingnya tugasnya. Negara akan maju jika birokrasinya efektif, kreatif, dan produktif; sebaliknya, birokrasi yang tidak efektif, kreatif dan produktif juga akan mengakibatkan kehancuran suatu negara. Kenyataan ini mengungkapkan fakta bahwa masyarakat dapat mengalami dua efek negatif dari peran birokrasi. Birokrasi, di satu sisi, dapat membantu masyarakat mencapai tujuannya, tetapi juga dapat menyiksa, menindas, mengeksploitasi, dan bahkan membuat masyarakat hancur. Karena itu, tidak mengherankan bahwa diskusi tentang birokrasi menjadi salah satu komponen penting dalam domain ilmu sosial dan politik.⁸⁹

⁸⁹ Saiful Deni and Aji Deni, *DIKOTOMI POLITIK DAN ADMINISTRASI*, Pertama (Yogyakarta: Gramasurya, 2022), 33.

Jadi, organisasi birokrasi merupakan kegiatan yang membutuhkan kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik, mengikutsertakan banyak orang, dan sangat terorganisir dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Untuk meningkatkan birokrasi, dibutuhkan dukungan orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan, bukan hanya pada sistemnya saja, tetapi juga pada sistem atau aturan apapun yang dibuat. Jika orang-orang yang menjalankan sistem tersebut tidak memiliki kemampuan dan konsistensi dalam menjalankan sistem tersebut, sistem tersebut tidak akan berfungsi. Aparatur yang kuat secara fisik dan rohani (moral) harus digunakan untuk meningkatkan birokrasi pemerintahan. Tujuan dan aspirasi masyarakat akan lebih cepat terwujud jika harapan masyarakat terhadap birokrasi dilayani dengan baik tanpa berbelit-belit, dilakukan secara cepat dan tepat melalui pelayanan yang baik. Politik adalah alat untuk mencapai tujuan masyarakat melalui birokrasi pemerintahan yang dibentuk oleh proses politik.⁹⁰

B.3.2. Pegawai dalam Sistem Birokrasi Pemerintahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrat adalah pegawai yang bertindak secara demokratis atau seorang yang

⁹⁰ Bambang Agus Diana, "Pengaruh Politik Dalam Birokrasi Pemerintahan," *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 2, no. 1 (2020): 1–7, <https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i1.7585>.

menjadi bagian dari birokrasi.⁹¹ Sistem birokrasi dan karakteristiknya umumnya bermuara pada hal-hal yang berlaku bagi posisi eksternal pegawai. Posisi pegawai dalam sistem birokrasi memiliki beberapa tipe, yakni: *pertama*, pemangkuan jabatan merupakan sebuah *panggilan*. Sistem birokrasi mensyaratkan pelatihan yang ditentukan dengan ketat dalam perekrutan anggota pegawai. Dalam hal ini, sistem birokrasi memberikan ujian khusus yang telah ditentukan dan merupakan persyaratan kerja.

Kedua, dalam sistem birokrasi, posisi personal pegawai dipolakan dalam beberapa cara, yakni: 1) Pegawai dipolakan berdasarkan keberadaannya, khususnya dalam kantor swasta atau biro publik. Dalam hal ini, pegawai modern selalu mengusahakan untuk mendapatkan suatu penghargaan sosial yang nyata berbeda jika dibandingkan dengan mereka yang diperintah. 2) Tipe pegawai dalam sistem birokratis murni ditunjuk oleh suatu otoritas superior. Perekrutan pegawai dalam sistem birokrasi yang dipilih dan diperintah bukanlah sosok yang sepenuhnya birokratif. Pada hakikatnya, pejabat yang terpilih dengan cara itu mempunyai posisi otonom yang berlawanan dengan pejabat

⁹¹ Dendy Sugono, "Kamus Bahasa Indonesia" (Jakarta, Indonesia: Kamus Pusat Bahasa, 2008).

supraordinat. Pejabat terpilih tidak mendapatkan posisinya *dari atas* melainkan *dari bawa*, atau setidaknya bukan dari otoritas superior hirarki kedinasan melainkan dari orang-orang partai yang juga menentukan karirnya lebih lanjut. 3) Dalam sistem birokrasi, posisi pegawai dipegang untuk seumur hidup dalam birokrasi publik dan hal tersebut makin banyak berlaku bagi semua struktur serupa. 4) pegawai menerima gaji rutin sebagai upah dari pekerjaannya dan jaminan hari tua yang berupa gaji pensiun. Gaji tidak didasarkan seperti pada apa yang dikerjakan dan diselesaikan, tetapi didasarkan pada status kepegawaian, seperti pangkat dan masa pengabdian. 5) Dalam sistem birokrasi, pegawai dikader untuk meniti karir yang telah ditentukan dalam struktur organisasi kedinasan.

Menurut Weber, karakteristik birokrasi dari pejabat modern dapat dilihat dalam fungsi khusus, sebagai berikut:

- a. Prinsip yurisdiksi yang tetap dan resmi, umumnya diatur oleh peraturan seperti undang-undang atau peraturan administratif, menjadi dasar bagi birokrasi.
- b. Prinsip-prinsip hierarki jabatan dan tingkatan kekuasaan yang bertingkat menunjukkan sistem super dan subordinasi yang teratur, di mana jabatan yang rendah diawasi oleh

mereka yang memiliki jabatan lebih tinggi. Sistem seperti ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengajukan banding terhadap keputusan orang yang memiliki jabatan rendah kepada orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, dengan tata cara yang ditetapkan secara jelas. Dengan perkembangan tipe birokrasi secara lengkap, hierarki menjadi terorganisir secara monokratis. Prinsip wewenang jabatan hierarkis hadir dalam semua struktur birokrasi, baik dalam struktur negara, gerejawi, partai besar, maupun perusahaan swasta. Apakah kewenangannya disebut 'pribadi' atau 'publik', tidak menjadi masalah terkait dengan karakter kompetensi.⁹²

- c. Manajemen kantor modern bergantung pada penggunaan dokumen tertulis (file) yang disimpan dalam bentuk asli atau rencana. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam staf pejabat subaltern dan juru tulis. Organisasi pejabat yang aktif dalam kegiatan kantor 'publik', bersama dengan peralatan dan arsip yang dimilikinya, membentuk sebuah 'biro'. Dalam konteks perusahaan swasta, istilah 'biro' sering diganti dengan 'kantor'.⁹³

⁹² Max Weber, "From Max Weber Essays in Sociology, Ed. Hans Gerth, Nachdr. d. Ausg. 1958" (New York: Oxford University Press, 1981), 197.

⁹³ Weber, 197.

Mengenai hal ini, Weber menjelaskan bahwa pada dasarnya, dalam organisasi pegawai negeri modern, terjadi pemisahan antara kantor atau biro dengan tempat tinggal pribadi pejabat. Secara umum, prinsip-prinsip menguraikan perpecahan antara kegiatan resmi dan cakupan kehidupan pribadi. Uang dan peralatan publik dipisahkan dari kepemilikan pribadi pejabat. Keadaan ini merupakan hasil dari perkembangan yang panjang, dan pada saat ini, prinsip ini ditemukan baik di perusahaan publik maupun swasta. Dalam kasus perusahaan swasta, prinsip tersebut bahkan berlaku hingga pengusaha terkemuka. Prinsipnya adalah bahwa jabatan eksekutif harus dipisahkan dari rumah tangga, bisnis harus dibedakan dari korespondensi pribadi, dan aset bisnis harus dipisahkan dari kekayaan pribadi. Semakin konsisten manajemen bisnis modern dijalankan, semakin banyak perpecahan yang terjadi. Proses ini dapat ditelusuri kembali ke awal Abad pertengahan (*Middle Ages*).⁹⁴

Selanjutnya, Weber menjelaskan bahwa ciri khas dari pengusaha modern adalah perilakunya sebagai 'pejabat utama' di perusahaannya, mirip dengan penguasa dalam birokrasi modern yang menyebut dirinya sebagai 'pelayan utama' negara. Gagasan bahwa aktivitas biro negara pada dasarnya berbeda dengan pengelolaan kantor ekonomi swasta

⁹⁴ Weber, 197.

merupakan konsep yang berasal dari benua Eropa dan, sebaliknya, sepenuhnya tidak dikenal dalam perspektif Amerika.

Manajemen kantor, terutama manajemen kantor khusus yang jelas merupakan konsep modern, umumnya memerlukan pelatihan yang komprehensif dan keahlian. Ini menjadi semakin penting bagi eksekutif dan karyawan perusahaan swasta, sebagaimana juga dengan pejabat di tingkat negara.⁹⁵

Ketika suatu kantor telah mencapai tingkat perkembangan penuh, kegiatan resmi menuntut kapasitas kerja maksimal dari pejabat tersebut, meskipun waktu di kantor dapat dibatasi secara ketat. Dalam situasi normal, ini adalah hasil dari perkembangan jangka panjang, baik di kantor publik maupun swasta. Sebelumnya, dalam semua kasus, kondisi normalnya berkebalikan: urusan resmi dianggap sebagai kegiatan sekunder.⁹⁶

Pengelolaan kantor mengikuti aturan-aturan umum yang cenderung stabil, lebih atau kurang komprehensif, dan dapat dipelajari. Pengetahuan tentang aturan-aturan ini mencerminkan pembelajaran teknis khusus yang dimiliki oleh para pejabat. Ini melibatkan pengetahuan tentang yurisprudensi, administrasi, atau manajemen bisnis.⁹⁷

⁹⁵ Weber, 198.

⁹⁶ Weber, 198.

⁹⁷ Weber, 198.

Mengenai hal ini, Weber berpendapat bahwa reduksi manajemen kantor modern mengacu pada ketentuan peraturan yang telah tertanam kuat di dalamnya. Teori administrasi publik modern, misalnya, menganggap bahwa kewenangan untuk mengatur aspek tertentu melalui keputusan yang telah diberikan kepada otoritas publik tidak memberikan hak kepada biro untuk mengatur masalah tersebut berdasarkan perintah kasus per kasus, melainkan hanya untuk mengatur masalah tersebut secara abstrak. Pendekatan ini sangat berbeda dengan pengaturan semua hubungan melalui hak istimewa individu dan pemberian bantuan, yang cenderung dominan dalam patrimonialisme, setidaknya selama hubungan tersebut tidak ditentukan oleh tradisi suci.⁹⁸

B.4. Birokrasi Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama membantu presiden menjalankan pemerintahan negara dengan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan. Untuk menciptakan organisasi yang memadai, memiliki efektifitas, dan efisiensi yang dapat mendorong peningkatan kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab dan pengabdian di Kementerian Agama sebagai lembaga vertikal yang melaksanakan pemerintahan di bidang keagamaan, struktur organisasi harus

⁹⁸ Weber, 198.

disederhanakan. Penyederhanaan dimaksudkan untuk menyediakan layanan keagamaan di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani merupakan amanat reformasi yang hingga saat ini masih menjadi impian dan cita-cita yang tak kunjung terealisasi. Sejarah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia penuh dengan praktek politik pada sistem birokrasi, karena kedudukan birokrasi tidak dapat berfungsi netral karena adanya intervensi dan tekanan politik yang mendominasi dalam sistem pemerintahan. Hal ini diperparah dengan buruknya manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) selama ini takluk pada tekanan pejabat politik untuk promosi dalam jabatan karier ASN. Kebijakan Sistem Merit dalam Manajemen ASN ditetapkan sebagai dasar untuk pembangunan birokrasi profesional, berintegritas, dan netral. Faktanya, pemilihan dan promosi jabatan ASN lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan politik dalam birokrasi, termasuk pembebasan tugas pada jabatan tertentu sangat dipengaruhi oleh politisasi birokrasi. Untuk meningkatkan profesionalitas dan netralitas, UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN menetapkan bahwa pemerintah harus menerapkan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya aparatur negara. Program reformasi birokrasi ini memulai implementasi sistem merit dalam pengelolaan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur negara. Menurut UU di atas, sistem merit diartikan sebagai pengambilan keputusan dan pengelolaan ASN yang

didasarkan pada pemenuhan syarat yang ditetapkan, memiliki kompetensi, dan berkinerja baik, yang diterapkan secara berkeadilan, pantas, dan tidak membeda-bedakan. Tujuan yang hendak dicapai adalah membangun sistem birokrasi pemerintahan yang memiliki efektifitas, efisiensi, bersih, bertanggung jawab, dan menghadirkan pelayanan prima. UU ASN bertujuan untuk mengubah beberapa beberapa elemen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia; Pertama, pergeseran dari sistem karir tertutup yang sangat berfokus pada senioritas dan kepangkatan ke sistem karir terbuka yang mengutamakan persaingan, dan kedua, pergeseran dari pendekatan manajemen sumber daya manusia yang hanya berfokus pada pencatatan administratif kepegawaian ke manajemen sumber daya manusia menganggap pegawai sebagai kekayaan negara yang sejatinya diberi perhatian serius, diberi penghargaan, dan ditingkatkan kompetensinya dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.⁹⁹

Taufik Effendi menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan Indonesia dipengaruhi oleh kondisi objektif tertentu. Kondisi objektif negara harus dikuasai, dipahami, dan dihayati. Bhineka Tunggal Ika

⁹⁹ Andi Sefullah, A Muin Fahmal, and Muhammad Fachri Said, "Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Sulawesi Selatan," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 30–40, <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang28>.

memiliki potensi dan kekayaan, tetapi mereka juga bisa menjadi bahaya jika tidak digunakan dengan benar.¹⁰⁰

Reformasi birokrasi berfokus pada cara peningkatan kinerja organisasi sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Azwar Abubakar membandingkannya dengan sebuah mesin: Mesin dengan kapasitas kecil pasti tidak memiliki output yang besar, tetapi mesin dengan kapasitas besar harus membutuhkan pasokan energi yang lebih besar, tetapi dapat menghasilkan output yang jauh lebih besar daripada jumlah energi yang dikonsumsi. Jadi, masalahnya bukan ukurannya, tetapi bagaimana menjalankan mesin secara maksimal demi tercapainya hasil yang sesuai dengan target, baik secara kualitas maupun kuantitas.¹⁰¹

Tujuan diterapkannya reformasi administrasi dan birokrasi pada pemerintahan adalah demi menghadirkan layanan yang berkualitas, memperkuat peraturan dan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah, menerapkan undang-undang dan peraturan yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.¹⁰²

¹⁰⁰ Taufiq Effendi, *ABC Reformasi Birokrasi*, ed. Ismail Mohamad, Pertama (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Kementerian PAN & RB, 2010), 6.

¹⁰¹ Azwar Abubakar, *Pemimpin Dan Reformasi Birokrasi*, Pertama (Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2013), 4.

¹⁰² M R Lay, "Model Reformasi Administrasi Dan Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Administrasi Publik*, 2021, 1–10, <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jap/article/view/a878>.

Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan memberikan layanan keagamaan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, Kementerian Agama terus berbenah diri dan berinovasi untuk menghadirkan layanan keagamaan yang cepat, tepat dan efektif. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kementerian Agama memberi penekanan pada 7 program yang menjadi prioritas, adalah: memberi perhatian pada penguatan moderasi beragama, melakukan transformasi digital, menetapkan tahun toleransi beragama, merevitalisasi KUA, meningkatkan religiosity index, menciptakan kemandirian pesantren, dan penerapan cyber Islamic University.¹⁰³

¹⁰³ U c u, "Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Dalam Penguatan Aparatur Sipil Negara Di Kementerian Agama Republik Indonesia," *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia* 11, no. 1 (2020): 75–90, <https://doi.org/10.54783/jv.v11i1.185>.